

SKRIPSI

**PENGELOMPOKAN TINGKAT KEMISKINAN
BERDASARKAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN
PENGELUARAN PERKAPITA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI ACEH TAHUN 2012-2016**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD REZA FAHLEFI
NIM: 140602006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**PENGELOMPOKAN TINGKAT KEMISKINAN
BERDASARKAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN
PENGELUARAN PERKAPITA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI ACEH TAHUN 2012-2016**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD REZA FAHLEFI
NIM: 140602006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Reza Fahlefi

NIM : 140602006

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan



Muhammad Reza Fahlefi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**PENGELOMPOKAN TINGKAT KEMISKINAN BERDASARKAN
DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENGELUARAN PERKAPITA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2012-2016**

Disusun Oleh:

Muhammad Reza Fahlefi

NIM: 140602006

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Cut Dian Fitri, SE., AK., M.Si

NIP: 19830709 201403 2 002

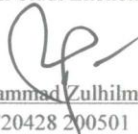
Pembimbing II,



Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui.

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Muhammad Zulhili, MA

NIP: 19720428 200501 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Muhammad Reza Fahlefi

NIM: 140602006

Dengan Judul:

**PENGELOMPOKAN TINGKAT KEMISKINAN BERDASARKAN
DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENGELUARAN PERKAPITA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2012-2016**

Telah disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 05 Juni 2018

22 Ramadhan 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua,

Cut Dian Fitri, SE, AK., M.Si

NIP: 19830709 201403 2 002

Sekretaris,

Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Penguji I,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 19561231 198703 1 031

Penguji II,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

NIP: 19720428 200501 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Reza Fahlefi
NIM : 140602006
Fakultas/Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : rezascootr@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

**Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Dana
Otonomi Khusus dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota
Di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Juli 2018

Mengetahui

Penulis

Pembimbing

Pembimbing II

M. Reza F

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19830709 201403 2 002

Winy Dian Safitri, S.Si., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Dana Otonomi Khusus dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,MA selaku Wakil Dekan I, Drs. Zaki Fuad, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Cut Dian Fitri, SE, Ak.,M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry.
4. Cut Dian Fitri, SE,. M.Si., Ak., CA sebagai Pembimbing I dan Ibu Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku

pembimbing II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini.

5. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Alm. Tarmizi dan Ibunda Mariami, serta ayahanda Mahyiddin Abdullah dan ibunda Rumiana yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini..
6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi yang terbaik buat saya, dan seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya dan seluruh bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Muhammad Arifin, Ph.D dan Ismail Rasyid RidlaTarigan, M.A selaku ketua dan sekretaris Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
8. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA dan Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku dosen penguji I dan dosen penguji II.
9. Teman-teman Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
10. Pamanku Hazli Akbar dan Makcek Syarifah Rukiah yang tak henti-hentinya telah memberi doa, ide, dukungan, motivasi, serta mendengarkan keluh-kesah sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

11. Adikku tersayang Rita Zahara, Kakak-kakakku tersayang Mutia Intan Sari dan Mahdaniar, serta abangku Mahlil, Miswar, Imran, Fauzan, keponakan ku Zafran yang telah mendoakan, memberikan semangat serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna untuk memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berguna bagi seluruh umat di muka bumi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik Asyi, Ajir, Nasrul, Chairunnas, Ghufuran, Ita, Kausar, Rama, Khusna, Riski, Rahmi, Mustaqim, Sayid, Iyut, Intan, Aseng dan sahabat-sahabat lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 4 mei 2018
Penulis,

Muhammad Reza Fahlefi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASANTEORI	9
2.1 Teori Kemiskinan	9
2.1.1 Pengertian Kemiskinan	9
2.1.2 Kategori Kemiskinan Menurut BPS	9
2.1.3 Pengertian Kemiskinan Menurut Pandangan Islam	10
2.1.4 Paradigma Pembangunan dan Kemiskinan	11
2.1.5 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan	13
2.1.6 Landasan Hukum Kemiskinan Dalam Pandangan Islam	13
2.2 Teori Otonomi Khusus	16
2.2.1 Sejarah Otonomi Khusus Aceh	16
2.2.2 Pengertian Otonomi Khusus dan dana Otonomi Khusus	21

	Halaman
2.2.3 Manfaat Dana Otonomi Khusus	22
2.2.4 Daerah Yang Diberikan Otonomi Khusus.....	22
2.2.5 Aceh Sebagai daerah Otonomi Khusus	22
2.2.6 Landasan Hukum Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus	23
2.2.7 Implementasi penggunaan dana otonomikhusus pada realisasi anggaran	25
2.2.8 Peraturan Gubernur Aceh	26
2.3 Teori Pengeluaran Perkapita	28
2.3.1 Pengertian Pengeluaran Perkapita	28
2.3.2 Pengeluaran Perkapita Menurut Pakar	29
2.3.3 Rumusan Pengeluaran Perkapita	29
2.4 Keterkaitan Antar Variabel	29
2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.5.1 Matrik Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Kerangka Pemikiran.....	46
BAB IIIMETODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Jenis Data	48
3.3 Operasional Variabel.....	49
3.4 Analisis Komponen Utama	50
3.5 Tahapan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Statistik Deskriptif	55
4.1.1 Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	55
4.1.2 Rata-Rata Dana Otsus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	59
4.1.3 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota diProvinsi Aceh.....	61
4.2 Pengelompokan Kabupaten/kota Berdasarkan Tingkat	63
4.2.1 Pengelompokan Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012	66

	Halaman
4.2.2 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2012.....	68
4.2.3 Pengelompokan Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013	70
4.2.4 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2013.....	73
4.2.5 Pengelompokan Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014.....	74
4.2.6 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2014.....	76
4.2.7 Pengelompokan Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015.....	77
4.2.8 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2015.....	80
4.2.9 Pengelompokan Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016.....	82
4.2.10 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2016.....	84
4.3 Gambaran Hubungan Antara Dana Otsus dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2012-2016.....	86
4.3.1 Hubungan Antara Dana Otsus Terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh.....	86
4.3.2 Hubungan Antara Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh	89
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

ABSTRAK

Nama : Muhammad Reza Fahlefi
Nim : 140602006
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Dana Otonomi Khusus Dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016
Tanggal sidang : 5 Juni 2018
Tebal skripsi : 126 Halaman
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan kelompok, persebaran tingkat kemiskinan, dan gambaran hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dana outsaus Aceh, data pengeluaran perkapita Aceh dan data persentase kemiskinan Aceh tahun 2012- 2016 yang berasal Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Provinsi Aceh dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan adalah metode analisis komponen utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang rendah dari tahun 2012-2016 yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Persebaran tingkat kemiskinan Aceh sangat dipengaruhi oleh daerah yang berdekatan. Ada hubungan kuat antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan ditandai dengan banyaknya kabupaten/kota yang berada pada kuadran I. Artinya semakin tinggi dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita, tingkat kemiskinan juga semakin tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena tata kelola dana otonomi khusus kabupaten/kota yang belum tepat sasaran.

Kata Kunci : kemiskinan, analisis komponen utama, tingkat kemiskinan.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Definisi Variabel Penelitian	49
Tabel 4.1 Komponen Utama (KU_1) data dari tahun 2012 sampai tahun 2016	64
Tabel 4.2 Skor komponen utama pertama (W_1)	65
Tabel 4.3 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkatkemiskinan 2012.....	67
Tabel 4.4 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan2013.....	71
Tabel 4.5Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan 2014.....	75
Tabel 4.6Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan 2015.....	79
Tabel 4.7 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan 2016.....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Kab/Kota di Provinsi Aceh.....	55
Gambar 4.2 Rata-Rata Dana Otsus Kab/Kota di Provinsi Aceh.....	60
Gambar 4.3 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Perkapita Kab/Kota di Provinsi Aceh.....	62
Gambar 4.4 Peta kontur persentase tingkat kemiskinan tahun 2012.....	69
Gambar 4.5 Peta kontur persentase tingkat kemiskinan tahun 2013.....	73
Gambar 4.6 Peta kontur persentase tingkat kemiskinan tahun 2014.....	77
Gambar 4.7 Peta kontur persentase tingkat kemiskinan tahun 2015.....	81
Gambar 4.8 Peta kontur persentase tingkat kemiskinan tahun 2016	85
Gambar 4.9 Hubungan Antara Dana Otsus Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	87
Gambar 4.10 Hubungan Antara Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016..... 98
Lampiran 2	Persentase Pengeluaran Perkapita Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016..... 99
Lampiran 3	Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016.. 100
Lampiran 4	Rata-Rata Dana Otsus Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016..... 101
Lampiran 5	Rata-Rata Persentase Pengeluaran Perkapita Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016.. 102
Lampiran 6	Dana Otsus Kab/Kota di Provinsi Aceh Menurut PergubTahun 2012-2016 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang sangat penting serta menjadi perhatian utama di berbagai negara, kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi tolak ukur bagi pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan baik negara maupun daerah.

Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, selama periode 1976-1996 (Repelita II - V), tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara drastis yaitu dari 40% di awal Repelita II menjadi 11% pada awal Repelita V (Mubyarto, 2003). Catatan gemilang tersebut tidak terlepas dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pembangunan tersebut, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh di atas 7 persen tiap tahunnya. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan ini kemudian mendapat banyak pujian dari masyarakat

dunia. Laporan World Bank (1993) yang bertajuk: "*The East Asian Miracle*", menempatkan Indonesia menjadi salah satu macan Asia dalam daftar "*The High Performing Asian Economies (HPAEs)*" sejajar dengan Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Singapura (Purwanto, 2007). Sehingga menjadikan nama Indonesia naik pada level dunia, akan tetapi pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami penurunan ditandai krisis moneter.

Provinsi Aceh juga ikut merasakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai dari tahun 1998 dan 2008. Pada tahun 2016 persentase tingkat kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 17,11%. Dengan ini menjadikan Provinsi Aceh peringkat ketujuh daerah dengan persentase tingkat kemiskinan yang tinggi setelah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Bengkulu. Jika dihitung dari peringkat dengan persentase kemiskinannya di wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Bengkulu.

Otonomi Khusus (otsus) merupakan bagian dari resolusi konflik Aceh yang berkepanjangan membuat Aceh menjadi pusat perhatian dunia serta upaya perdamaian yang dibarengi dengan semangat rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca bencana tsunami tahun 2004 silam. Berawal dari penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 dan legalnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seluruh komponen negara berbondong-

bondong memusatkan perhatian dan potensi bangsa untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Aceh seperti sedia kala, bahkan harus jauh lebih baik. Salah satu upaya kongkret dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Aceh dengan mengalokasikan dana otonomi khusus. Perlakuan kebijakan asimetris ini dilihat salah satunya karena faktor sejarah, politik, konflik, dan budaya.

Jumlah dana otonomi khusus yang akan diterima Provinsi Aceh sampai tahun 2027 sebesar 100 triliun. Sejak tahun 2008 sampai 2016 Provinsi Aceh menerima lebih kurang berjumlah 49,9 triliun. Dari total rencana alokasi dana otonomi khusus Aceh Rp. 100 triliun, tersisa 50,1 triliun untuk jangka waktu penerapan 11 tahun. Besarnya dana yang diterima Pemerintah Aceh tidak lantas membuat Aceh jauh lebih hebat dan lebih makmur dibandingkan daerah lain. Oleh karenanya harus dilakukan evaluasi agar sisa dana otonomi khusus Aceh yang tersisa benar-benar dapat membuat landasan yang kuat bagi Aceh agar bisa mandiri disaat tidak ada lagi dana otonomi khusus (Iriansyah, 2016).

Provinsi Aceh memiliki wilayah 23 kabupaten/kota, dengan total dana otonomi khusus yang dimiliki, maka dana tersebut wajib di salurkan ke setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Diharapkan dengan adanya dana otonomi khusus tersebut dapat membantu perekonomian yang ada di setiap kabupaten/kota, terutama dalam mensejahterakan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang muncul adalah mengenai kewenangan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana otonomi khusus, sesuai Pasal 179 ayat 2. Dengan tegas menyebutkan sumber pendapatan daerah, baik di Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya berasal dari dana otonomi khusus. Namun, secara administratif, UUPA memberikan kewenangan pada tingkat Provinsi, sehingga memberikan kesan bahwa pemerintahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana otonomi khusus.

Permasalahan kedua adalah dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh tiap tahunnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masih banyak kebijakan pemerintah Aceh dalam penggunaan dana tersebut lebih mementingkan pembangunan kantor yang megah dan kepentingan elit politik partai lokal di Aceh sebagai mayoritas tunggal. Sedangkan program pembangunan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat masih minim.

Perekonomian di Aceh bisa dilihat dengan besarnya pertumbuhan perkapita melalui pendapatan maupun pengeluaran. Dalam penelitian ini penulis ingin mengukurnya dengan menggunakan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum

menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk (BPS, 2017).

Dari penjelasan diatas, penulis menganggap adanya keterkaitan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan sehingga perlu adanya penelitian khusus untuk menganalisis pengelompokan tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh guna membantu Pemerintah Aceh dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Provinsi Aceh agar sejahtera. Sehingga penelitian ini mengangkat judul:

PENGELOMPOKAN TINGKAT KEMISKINAN BERDASARKAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENGELUARAN PERKAPITA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2012-2016

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan tingkat kemiskinan kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan dana otsus dan pengeluaran perkapita dari tahun 2012-2016?
2. Bagaimana persebaran tingkat kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2012 sampai tahun 2016?

3. Bagaimana gambaran hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perubahan tingkat kemiskinan kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan dana otsus dan pengeluaran perkapita dari tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui persebaran tingkat kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2012 sampai tahun 2016.
3. Untuk mengetahui gambaran hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dari tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada pemerintah, masyarakat dan mahasiswa terhadap tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Aceh.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi pemahaman mengenai dana otonomi khusus yang tersisa kurang lebih 10 tahun lagi guna memajukan Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah dari ketertinggalan sehingga menciptakan kemandirian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan panyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas. Serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini akan diuraikan pada paragraf dibawah ini.

Bab I: Pendahuluan

Menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang berisi latar belakang sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan dan menilai penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini. Kerangka pemikiran yang menerapkan secara ringkas kaitan antara variabel yang akan diteliti sesuai teori atau fakta lapangan, serta hipotesis penelitian yang menjadi pedoman dalam analisis data.

Bab III: Metode Penelitian

Berisi pendekatan atau metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi defisini operasional atau penjelasan variabel penelitian, tempat atau lokasi dan waktu penelitian,

sumber data atau populasi dan sampel, instrumen dan cara pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian deskripsi data berisi serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung seperti latar belakang lembaga, instansi yang diteliti, struktur organisasi dan sebagainya serta data utama yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Yang mana data-data tersebut harus dideskripsikan secara sistematis. Serta bagian pembahasan berisi tentang hasil penelitian sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Bagian pembahasan ini memperlihatkan ketajaman dan keluasan wawasan penulis mengenai permasalahan yang dikaji.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Menyajikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas, serta memberikan saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kemiskinan

2.1.1 Pengertian kemiskinan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (KBBI).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2018).

2.1.2 Kategori Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan orang miskin antara lain sebagai berikut:

- a) Tidak miskin, mereka yang pengeluaran orang/bulan lebih dari Rp 350.610,-

- b) Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- s/d. Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- s/d Rp11.687,- orang/hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.
- c) Hampir miskin, dengan pengeluaran bulan/kepala antara Rp 233.740,- s/d Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- s/d Rp 9.350,- orang/hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
- d) Miskin, dengan pengeluaran bulan/kepala Rp 233.740,- ke bawah atau sekitar Rp 7.780,- ke bawah orang/hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
- e) Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran orang/hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta (Kholis, 2014).

2.1.3 Pengertian Kemiskinan Menurut Pandangan Islam

Kemiskinan telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi mereka yang miskin, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kemiskinan juga disinyalir berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan. Tingkat kesehatan masyarakat yang terabaikan, aspek kualitas pendidikan yang tidak merata, marginalisasi dan diskriminasi, dalamnya jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi munculnya perilaku kriminalisasi, misalnya, aksi pencurian, perampokan, penjarahan yang dimotori oleh kemiskinan.

Kenyataan ini kembali menguatkan bahwa kemiskinan merupakan penyakit sosial yang harus segera diatasi (Wargadinata, 2011).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam kategori *Dharuri (utama)*. Kemiskinan timbul disebabkan oleh minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan.

2.1.4 Paradigma Pembangunan dan Kemiskinan

Paradigma sebagai ruang lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variabel yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dan paradigma pembangunan ekonomi islam. Kemudian variabel inilah yang menunjukkan perbedaan antara keduanya, karena perbedaan cara pandang ini memunculkan kesimpulan yang berbeda tentang paradigma pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi konvensional memiliki pengukuran yang sudah biasa dilakukan, seperti *growth* bagaimana islam memandang hal tersebut dan bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasinya, serta kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh negara disaat pertumbuhan semakin tinggi namun kesenjangan juga tinggi. Konsep islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi islam adalah multidimensional. Pembangunan ekonomi islam bukan hanya pembangunan materiel,

tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pertumbuhan ekonomi (*growth*) adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang mewujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi.

Pendekatan kontemporer melihat bahwa penyebab kemiskinan bisa dilihat dari tiga teori berikut ini. Pertama, teori yang menekankan pada nilai-nilai. Mereka miskin karena mereka bodoh, malas, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi dan fatalistik. Kedua, teori yang menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat. Teori ini menganggap orang itu miskin karena kurangnya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Ketiga, teori yang menekankan pada pembagian kekuasaan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat. Tatanan dan struktur masyarakat yang ada dianggap sebagai hasil paksaan (bukan konsensus) sekelompok kecil anggota masyarakat yang berkuasa dan kaya akan mayoritas warga masyarakat miskin, dan inilah yang menjadi penyebab kemiskinan. Jalan keluar dari teori ini bermacam-macam pula. Bagi teori pertama, caranya mereka harus dicerdaskan, sedangkan teori kedua caranya yaitu perlu adanya

industrialisasi agar ada tetesan kebawah. Bagi teori ketiganya yang diperlukan yaitu perombakan struktur. Dilihat dari beberapa teori ini ada beberapa pendekatan dalam memahami kemiskinan dan penyebab yang dapat disederhanakan, yaitu sebab kultural yang dilatari oleh teori kapitalisme dan sebab struktural yang dilatari oleh teori marxisme. Namun masih ada sebab lain yang tidak boleh dilupakan yaitu peristiwa-peristiwa alam (Huda, 2015).

2.1.5 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikannya seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia dan zalim kepada dirinya sendiri (Qardhawi, 2005).

2.1.6 Landasan Hukum Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Islam menjelaskan kemiskinan sebagai salah satu masalah yang perlu diselesaikan, karena kemiskinan juga merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan masyarakat yang perlu diberantas dengan

solusi agar dapat diminimalisirkan. Dalam Al-Quran dijelaskan pada Surat at-Taubah ayat 60 yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Abdul Hayy (1994) miskin pada ayat ini adalah seorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencapai nisab atau dapat dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan (Kholis, 2014).

Dalam Al-Quran juga dijelaskan pada Surat Al-Dzariyat ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

“Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.”

Maka tidak heran jika Rasulullah pernah berdo'a sebagaimana yang terekam dalam salah satu hadisnya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran”. (HR. Abu Daud).

Nabi saw. mengucapkan do’a tersebut berarti mewajibkan setiap individu untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan itu sama celanya dengan kekufuran, dan karena setiap individu harus memerangi kekufuran, berarti juga harus memerangi kemiskinan.

Manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak terkecuali kuasa atas dirinya keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Ayat yang sering dirujuk kaitannya dengan hal tersebut adalah QS. Al-Ra’d ayat 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi dianjurkan untuk berusaha. Allah SWT telah memberikan bumi beserta isinya, cara pengelolaan dan pemanfaatan dari isi bumi tersebut di serahkan kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk dikelola yang sesuai dengan syariah tanpa merugikan orang lain. Manusia adalah makhluk yang sangat sempurna, diberikan hawa nafsu beserta akal pikiran guna menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi larangan dari Allah SWT.

2.2 Teori Otonomi Khusus

2.2.1 Sejarah Otonomi Khusus Aceh

Aceh dalam akar sejarahnya dikenal sebagai bangsa yang teguh mempertahankan kedaulatannya dari kolonialisme Belanda dan Inggris. Paska ditandatanganinya *Trety of Sumatera* Tahun 1871 yang berisikan penyerahan Aceh dari Inggris kepada Belanda yang berbuah perang panjang yakni tahun 1873-1914, pergolakan demi pergolakan terus dilakukan guna mengusir para penjajah. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia menyatakan merdeka, residen Teungku Nyak arief dan Teungku Daud Beureueh sepakat untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (Guru, 2000).

Kemudian, terjadi beberapa perselisihan akibat ketidakpuasan atas keputusan politik Republik Indonesia dibawah kabinet Hatta, benih gerakan separatis pun tumbuh. Daud Beureueh menggabungkan diri sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, dikarenakan rasa kecewa elit Aceh atas keputusan “Politik Jakarta” yang hanya menjadikan Aceh daerah setingkat Kabupaten dibawah Provinsi Sumatera Utara, sehingga demikian secara yuridis otomatis Provinsi Aceh dibubarkan begitu saja.

Mudayat (1996) mendefenisikan pilihan memberikan otonomi khusus sebagai *affirmative action* pun dilakukan guna meredam konflik dan mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh, gendakan senjata dilakukan dengan syarat Aceh tidak hanya

dijadikan daerah Provinsi tapi lebih dari itu yaitu diakui sebagai Negara Bagian Aceh (NBA). Pendukung NBA ini antara lain adalah Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Ishak Amin. Mereka bersepakat dengan wakil pemerintah yaitu Ali Hasjmy, Gaharu, dan Muhammad Insja (kepala polisi). Mereka sepakat dengan tiga tujuan utama yaitu 1) Memajukan Islam: 2) Membangun Aceh dalam arti luas: 3) Berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat Aceh.

Kesepakatan tersebut setelah dilakukan beberapa penyesuaian akhirnya diberikan landasan yuridis dengan diterbitkannya Keputusan Wakil Perdana Menteri RI No.1/Misi/1959 tanggal 31 Mei 1959, yaitu dengan pembentukan daerah Istimewa Aceh berdasarkan UU No.1 tahun 1957 yang menganut otonomi yang seluas-luasnya terutama di bidang agama, pendidikan, dan adat (Haris ,1999).

Akan tetapi pada perjalanannya pemberian otonomi tersebut tidak efektif pelaksanaannya, karena pada dekade 1960-an NKRI disibukkan dengan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda dan konfrontasi Ganyang Malaysia yang memberikan Presiden Soekarno *common enemy* untuk diberantas sehingga konsentrasi kewenangan secara de facto tertumpu di tangan Presiden Soekarno, yang pada gilirannya mengakibatkan pelaksanaan otonomi daerah menjadi bias.

Puncaknya pada era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto menerbitkan UU No.5 tahun 1974 yang justru

memperteguh sistem pemerintahan sentralistik di Indonesia sehingga mematikan inisiatif, membelenggu kewenangan, membunuh kearifan adat istiadat lokal yang dipaksakan untuk menjadi seragam. Akumulasi dari kekecewaan atas kebijakan tersebut maka pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pasca berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi. Pemerintah mulai menyadari bahwa bukanlah jalan yang tepat untuk mengatur wilayah otonom di Republik ini dengan seragam. Oleh karena itu lahirlah UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian khusus untuk kasus Aceh beberapa ketetapan MPR mengamanatkan diberlakukannya otonomi khusus. Untuk memenuhi amanat itu, maka pada tahun 2001 ditetapkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Implementasi otonomi khusus di Aceh pada proses pelaksanaannya UU No.18 tahun 2001 belum mampu meredam konflik dan perlawanan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berbarengan dengan momentum *natural turbulence* yaitu tragedi tsunami yang meluluhlantakkan Bumi Seurambi Mekah.

Sadar bahwa tindakan represif melalui penetapan DOM (Daerah Operasi Militer) gagal menyelesaikan akar permasalahan separatisme di aceh, pemerintah RI mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan GAM, yaitu dengan kembali melakukan perundingan dan dialog. Dari serangkaian perundingan

yang dilakukan sejak pengesahan UU No 18 tahun 2001, pada akhirnya pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, akhirnya keluarkan kata mufakat dengan ditanda tangannya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM.

Salah satu klausul kesepakatan itu, materi MoU Helsinki akan dituangkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Untuk memenuhi klausul di atas, maka pada 11 Juli 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

UUPA sendiri terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal. Berikut ini beberapa kekhususan pengaturan yang terdapat pada UUPA, antara lain:

1. Kewenangan Khusus
2. Lembaga di Daerah
3. Gubernur Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota (DPRA/K)
5. Partai Politik Lokal
6. Wali Nanggroe
7. pengakuan terhadap Lembaga Adat
8. Syari'at Islam
9. Mahkamah Syar'iyah
10. Pengadilan HAM di Aceh
11. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh

12. Pengelolaan Sumber Daya Alam

13. Keuangan

14. Pertanahan

Lahirnya Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu momentum sejarah yang cukup penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini kita sama-sama berharap dapat mengakhiri konflik berdarah dari gerakan separatisme yang sudah menyengsarakan seluruh pihak, sehingga terbuka kembalilah pintu menuju perdamaian yang hakiki di Aceh, terciptanya masyarakat yang madani, adil, bermatabat dan sejahtera, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan yang dahulu semat terpinggirkan.

UUPA sejauh ini cukup sukses dalam menyelesaikan permasalahan separatisme di Aceh, hal ini dapat kita lihat setelah adanya Otsus yang diberikan melalui UUPA, terjadi transformasi, kekuatan GAM ke dalam struktur pemerintahan modern dalam NKRI yang buahnya adalah peningkatan integrasi dan sinergitas bersama seluruh elemen. Dan tentu saja seluruh masyarakat Aceh berharap bahwa dengan adanya UUPA mampu menjadi titik pijak/fondasi untuk menciptakan Aceh yang sejahtera,

Kemudian dalam urgensitas dalam aspek percepatan pembangunan maka pemberian kewenangan yang besar ini berakibat pula dengan perubahan pola *financieele verhouding* (perimbangan keuangan) maka secara logis otonomi khusus yang

diberikan dibarengi pula dengan hubungan keuangan, yang kongkritnya Negara menyediakan sebesar 2% dari DAU Nasional selama 15 tahun dan 1% DAU Nasional untuk 5 tahun berikutnya dalam jangka waktu 20 tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 UU No. 11 Tahun 2006 untuk Pemerintah Aceh, ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi Aceh untuk merealisasikan percepatan pembangunan tersebut melalui program prioritas yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Program prioritas tersebut adalah pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

2.2.2 Pengertian Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus

Sesuai dengan UUD Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Sedangkan Dana Otonomi Khusus, yaitu dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ‘tertentu’ untuk membangun sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada daerah tertentu agar dapat menata lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya (UUD, 1945).

2.2.3 Manfaat Dana Otonomi Khusus

Nova Iriansyah (2016) dengan adanya limpahan dana otonomi khusus seharusnya Provinsi Aceh harus lebih maju atau menjadi pendorong kuat untuk mengejar ketertinggalan akibat konflik dan bencana. Keberhasilan kinerja di Aceh setidaknya mensyaratkan pada akumulasi dari produktifitas setiap komponen pembangunan untuk menyumbangkan produktifitasnya demi tercapainya percepatan pembangunan dan kemandirian.

2.2.4 Daerah Yang Diberikan Otonomi Khusus

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

2.2.5 Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Provinsi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2.2.6 Landasan Hukum Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.

Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

2.2.7 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Realisasi Anggaran

Telah dijelaskan bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada lima hal yaitu kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, infrastuktur dan sosial. Terdapat dalam Pasal 183 UU. No 11 Tahun 2006 yaitu:

1. Dana kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, agar setiap rakyat Aceh yang berobat tidak dipungut bayaran, Pembangunan pos-pos kesehatan, memberikan bonus pada para medis dan lain-lain.
2. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar Provinsi Aceh, mensubsidi Yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.
3. Dana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), digunakan untuk membantu pemberian modal kepada rakyat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonomi.

4. Dana Infrasrtuktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, jalan-jalan yang konsentrasi pemukiman rakyat Aceh, rehabilitasi atau membangun rumah-rumah sederhana untuk rakyat Aceh yang tidak mampu dan lain sebagainya.
5. Dana Sosial yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Sosial, digunakan untuk membantu rakyat Aceh dalam pengetasan masalah sosial, korban bencana alam, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial Akibat Konflik.(UUD, 1945)

2.2.8 Peraturan Gubernur Aceh

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang pagu indikatif, kriteria dan persyaratan seleksi program / kegiatan pembangunan sumber tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus tahun anggaran 2017. Dalam peraturan gubernur aceh nomor 6 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa,

- (1). Pengalokasian dana otsus, dilakukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga dialokasikan paling banyak 1% (satu persen) untuk pembangunan ibu kota provinsi;

- b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*), dengan perincian :
1. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
 2. 70% (tujuh puluh persen) lainnya dibagikan dengan mempertimbangkan indikator:
 - a. jumlah penduduk 30% (tiga puluh persen)
 - b. luas wilayah, 30% (tiga puluh persen)
 - c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 30% (tiga puluh persen)
 - d. Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), 10% (sepuluh persen)
 3. Realisasi kapasitas fiskal Kabupaten/Kota tahun sebelumnya yang terdiri atas
 - a) dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
 - b) dana alokasi umum; dan
 - c) dana alokasi khusus.

(2) Dana Otsus sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk transfer.

Adapun penyusunan program dan kegiatan yang ditercantum dalam pasal 7 yaitu:

- (1). Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditunjukkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.
- (2). Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/kota (RPJPK), Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/kota (RPJMK), RKP Kabupaten/Kota mengacu pada dokumen perencanaan provinsi.

2.3 Teori Pengeluaran Perkapita

2.3.1 Pengertian Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk (BPS, 2017).

2.3.2 Pengeluaran Perkapita Menurut Pakar

Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat (Nurhayani, 2012).

2.3.3 Rumusan Pengeluaran Perkapita

$$\frac{\text{Total pengeluaran anggota rumah tangga dalam sebulan} \times 100\%}{\text{Jumlah anggota rumah tangga}}$$

2.4 Keterkaitan Antar Variabel

Otonomi khusus sangat erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Dari pembahasan sebelumnya sesuai dengan Pasal 183 UU No. 11 Tahun 2006 untuk Pemerintah Aceh, ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi Aceh untuk merealisasikan percepatan pembangunan tersebut melalui program prioritas yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Program prioritas tersebut adalah pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Dengan adanya dana otonomi khusus ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan yang melanda provinsi aceh.

Tak hanya dengan dana otonomi khusus, pengeluaran perkapita juga sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Dari sudut pandang tingkat kemiskinan semakin besar pengeluaran perkapita maka akan semakin bagus guna perputaran roda perekonomian yang lebih baik dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di provinsi aceh. Sebaliknya apabila pengeluaran perkapita sedikit maka berdampak buruk dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Matrik Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal Shinta Warouw, Grace Nangoy, dan Treesje Runtu (2016) bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Anggaran Otonomi

Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan.

Dalam skripsi Marshall Halono Andre Laimeheriwa (2013) pertama, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal sedangkan dana otonomi khusus tidak berpengaruh secara signifikan. Kedua, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap IPM sedangkan dana otonomi khusus tidak berpengaruh secara signifikan. Ketiga, otonomi khusus dan DAU melalui belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Dalam jurnal Erwan Agus Purwanto (2007) usaha kecil menengah bisa dijadikan sebagai strategi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, namun karena kurangnya perhatian pemerintah Orde Baru ke sektor ini dan preferensi rezim Orde Baru lebih besar perhatiannya ke perusahaan, sehingga sektor ini telah menjadi keterbelakangan. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang baik dari sektor usaha kecil menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Dalam jurnal Nunung Nurwati (2008) kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif

dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Tentunya rumusan kebijakan dan program perlu dibenahi dan dilakukan rumusan kebijakan sesuai dengan pentahapan, dalam merumuskan kebijakan tersebut harus diperhatikan dan dipahami karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah.

Dalam jurnal Nano Prawoto (2009) Mencermati beberapa kekeliruan para-digmatik penanggulangan kemiskinan, dimana analisis yang seharusnya memunculkan variabel-variabel yang signifikan untuk mengganggu kemiskinan justru variabel yang tidak signifikan dimasukkan, maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan: seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain; untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan; melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan; strategi pemberdayaan.

Dalam jurnal Nurhayani (2012) Rata-rata pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar 4.35 persen setiap tahunnya. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan perkapita selama tahun 2005-2009, Kabupaten Batang Hari menempati urutan ke delapan dari 10 kabupaten/kota di provinsi Jambi. Selama tahun 2005-2009 pertumbuhan perkapita tertinggi

terjadi pada tahun 2005 dan terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 2.92 persen dari tahun sebelumnya, untuk tahun-tahun yang lain pertumbuhan perkapita Batang Hari berkisar 3-4 persen setiap tahunnya. Untuk Kabupaten Batang Hari rata-rata pengeluaran perkapita riil penduduk selama tahun tahun 2005-2009 terus mengalami peningkatan, Pengeluaran perkapita di Kabupaten Batang Hari terbesar berada pada golongan pengeluaran Rp. 300.000-Rp. 499.999 sebesar 45.65 persen dengan didominasi untuk pengeluaran makanan, terjadi pergeseran pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non makanan seiring dengan meningkatnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil
1	Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di	Dependen: Penggunaan Dana Otonomi Khusus Independen: Dana Otonomi Khusus	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan,

	Provinsi Papua Barat, Shinta Warouw, Grace Nangoy, dan Treesje (2016)			pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Anggaran Otonomi Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan.
2	Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi	Dependen: Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia Independen: Penerimaan	Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Regresi.	Pertama, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal sedangkan dana Otsus tidak berpengaruh

	Umum Terhadap Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Dan Kabupaten Provinsi Papua, Marshall Halono Andre Laimeheriwa (2013).	Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum.		secara signifikan. Kedua, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap IPM sedangkan dana Otsus tidak berpengaruh secara signifikan. Ketiga, Otsus dan DAU melalui belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.
3	Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk	potensi usaha kecil menengah dan kemiskinan	Metode kualitatif	UKM memiliki potensi yang besar untuk dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di

	<p>Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia, Erwan Agus Purwanto (2007)</p>			<p>Indonesia. Potensi tersebut salah satunya adalah dalam memberi kesempatan kerja pada jutaan penduduk di Indonesia yang tidak tertampung di sektor usaha besar, penciptaan Produk Domestik Bruto, dan mendorong ekspor. Sayangnya, potensi tersebut selama ini kurang terolah dengan baik. Hal ini karena selama</p>
--	---	--	--	--

				<p>kekuasaan Orde Baru pemerintah lebih banyak memberi perhatian kepada para pengusaha besar dari pada Pengusaha menengah dan kecil. Namun krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah membuka mata pemerintah bahwa UKM memiliki fleksibilitas yang lebih baik dibanding engan usaha besar. Usaha besar yang selama ini banyak</p>
--	--	--	--	---

				<p>diproteksi dan diberi fasilitas ternyata banyak yang gulung tikar dilanda krisis.</p> <p>Sementara itu UKM yang selama ini termajinalisasikan justru dapat bertahan dan menjadi katup pengaman bagi ribuan tenaga kerja yang di PHK ketika krisis terjadi.</p>
4	<p>Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif</p>	<p>Model pengukuran, permasalahan , dan alternatif kebijakan dan kemiskinan.</p>	<p>Metode kualitatif</p>	<p>Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan</p>

	Kebijakan, Nunung Nurwati (2008).			n akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan
--	--	--	--	--

				<p>jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Tentunya rumusan kebijakan dan program perlu dibenahi dan dilakukan rumusan kebijakan sesuai dengan pentahapan, dalam merumuskan</p>
--	--	--	--	--

				kebijakan tersebut harus diperhatikan dan dipahami karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah.
5	Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulagannya, Nano Prawoto (2009).	Kemiskinan dan solusi penanggulagannya.	Metode kualitatif	Mencermati beberapa kekeliruan para-digmatik penanggulangan kemiskinan, dimana analisis yang seharusnya memunculkan variabel-variabel yang signifikan untuk menganggulangi kemiskinan justru variabel yang tidak signifikan

				<p>dimasukkan, maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk</p>
--	--	--	--	---

				meningkatkan pendapatan, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, strategi pemberdayaan.
6	Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita Di Kabupaten Batanghari, Nurhayani (2012).	Pendapatan dan pengeluaran perkapita.	Metode regresi linier berganda.	Rata-rata pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar 4.35 persen setiap tahunnya. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan perkapita selama tahun 2005–

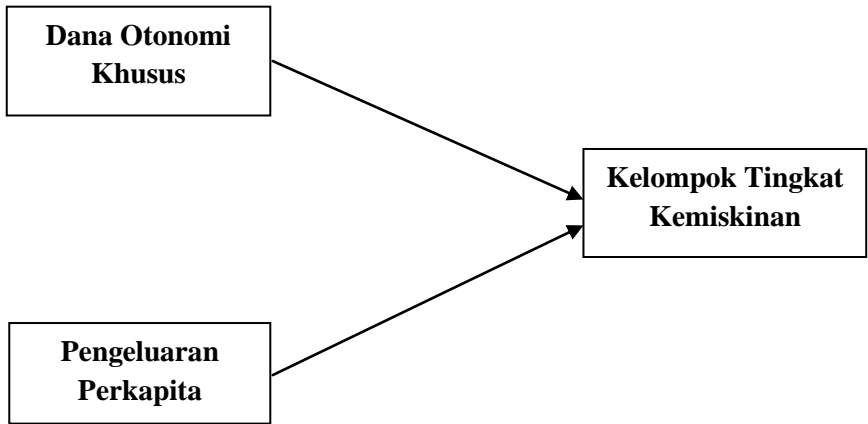
				<p>2009, Kabupaten Batang Hari menempati urutan ke delapan dari 10 kabupaten/kota di provinsi Jambi. Selama tahun 2005–2009 pertumbuhan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 2.92 persen dari tahun sebelumnya, untuk tahun–tahun yang lain pertumbuhan</p>
--	--	--	--	---

				<p>perkapita Batang Hari berkisar 3–4 persen setiap tahunnya. Untuk Kabupaten Batang Hari rata – rata pengeluaran perkapita rill penduduk selama tahun tahun 2005– 2009 terus mengalami peningkatan, Pengeluran perkapita di Kabupaten Batang Hari terbesar berada pada golongan pengeluaran Rp. 300.000– Rp.499.999</p>
--	--	--	--	--

				sebesar 45.65 persen dengan didominasi untuk pengeluaran makanan, terjadi pergeseran pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non makanan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.
--	--	--	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dilakukan pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan yang dilihat dari beberapa variabel yaitu dana otonomi khusus masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh, pengeluaran perkapita, dan persentase penduduk miskin tahun 2012-2016. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh ko,relasi hubungan antara variabel penelitian.

Dalam penelitian ini membahas tentang hubungan antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode analisis komponen utama dengan bantuan *software* MINITAB 16, Microsoft Excel dan *software* ArcGIS. Sehingga diperoleh hasil agar dapat ditarik kesimpulan.

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder, meliputi data persentase kemiskinan, dana otonomi khusus, dan pengeluaran perkapita tahun 2012 hingga 2016. Adapun data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel indikator tingkat kemiskinan yang diamati ada dua variabel. Untuk memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel Dependen	
Variabel	Definisi
Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk miskin (jiwa) pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012 sampai 2016.
Variabel Independen	
Variabel	Definisi
Dana Otonomi Khusus (X_1)	Pagu indikatif pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan otonomi khusus tahun anggaran 2012 sampai 2016 di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
Pengeluaran perkapita (X_2)	Persentase pengeluaran perkapita untuk makanan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

3.4 Analisis Komponen Utama

Analisis komponen utama (AKU) merupakan metode yang cukup baik untuk memperoleh koefisien penduga pada persamaan regresi yang mempunyai masalah multikolinieritas. Peubah bebas pada regresi komponen utama berupa hasil kombinasi linier dari peubah asal Z , yang disebut komponen utama (KU). Koefisien penduga dari metode ini diperoleh dari penyusutan dimensi komponen utama, dimana subset komponen utama yang dipilih harus tetap mempertahankan keragaman yang sebesar-besarnya. Dimana Z adalah hasil normal baku dari peubah X . Adapun hasil normal baku yang dimaksud adalah dengan mengurangkan setiap peubah bebas asal X_j dengan rata-rata dan dibagi dengan simpangan baku, dinotasikan :

$$Z_{ij} = \frac{X_i - \bar{X}}{s_j} \quad (1)$$

Cara penghapusan komponen utama dimulai dari prosedur seleksi akar ciri dari suatu persamaan :

$$|AX - \lambda I| = 0 \quad (2)$$

Jika akar ciri λ_j diurutkan dari nilai terbesarsampai nilai terkecil, maka pengaruh komponen utama W_j berpadanan dengan pengaruh λ_j . Ini berarti bahwa komponen-komponen tersebut menerangkan proporsi keragaman terhadap peubah tak bebas Y yang semakin lama semakin kecil.

Komponen utama W_j saling *orthogonal* sesamanya dan dibentuk melalui suatu hubungan :

$$W_j = v_{1j} Z_1 + v_{2j} Z_2 + v_{3j} Z_3 + \dots + v_{pj} Z_p \quad (3)$$

Dengan p adalah banyaknya peubah yang digunakan.

Vektor v_j diperoleh dari setiap akar ciri λ_j yang memenuhi suatu sistem persamaan homogen :

$$|AX - \lambda_j I| v_j = 0 \quad (4)$$

Dimana $v_j = (v_{1j}, v_{2j}, v_{3j}, \dots, v_{pj})$

Ada tiga metode yang umum digunakan untuk penentuan banyaknya komponen utama yaitu :

1. Apabila banyaknya komponen utama yang dihasilkan adalah q dimana $q \leq p$, maka yang telah ditransformasi (data skor komponen utama) mempunyai peubah sebanyak q . Misalkan proporsi untuk akar ciri ke $-i$ adalah :

$$\frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}$$

maka penentuan banyaknya komponen utama (q) didasarkan pada proporsi kumulatif dari akar-akar cirinya. Jika proporsi kumulatif dari q akar ciri pertama mencapai 80 % atau lebih, maka banyaknya komponen utama adalah q (Johnson dan Wichern, 1992).

2. Metode kedua ini hanya bisa diterapkan pada penggunaan matriks korelasi. Ketika menggunakan matriks ini, peubah asal ditransformasikan menjadi peubah yang memiliki sama yaitu satu. Pemilihan komponen utama didasarkan pada ragam komponen utama, yang tidak lain adalah akar ciri. Menurut

Jolliffe (1986) setelah melakukan studi mengatakan bahwa *cut off* yang lebih baik adalah 0.7.

3. Metode yang ketiga adalah penggunaan grafik yang disebut plot *scree*. Plot *scree* merupakan plot antara akar ciri λ_k dengan k . Dengan menggunakan plot ini, banyaknya komponen utama yang terpilih adalah k , jika pada titik k tersebut plotnya curam ke kiri tapi tidak curam ke kanan.

3.5 Tahapan Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mendapatkan model tingkat kemiskinan adalah metode analisis komponen utama dengan bantuan *software* MINITAB 16, Microsoft Excel dan *software* ArcGIS. Sebelum melakukan analisis, data ditransformasi kepeubah baku, hal ini dikarenakan oleh satuan pengukuran untuk peubah dalam penelitian ini tidak sama.

Selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data persentase tingkat kemiskinan, dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016.
2. Mencari rata-rata semua peubah dari data tahun 2012 sampai 2016.
3. Melakukan analisis komponen utama terhadap data rata-rata.
4. Menentukan banyaknya k komponen utama (KU) dari data rata-rata.

5. Mencari skor komponen utama (W) dari komponen utama (KU) yang terpilih.
6. Melakukan analisis *cluster* terhadap data skor komponen utama (W) untuk data rata-rata.
7. Melakukan analisis komponen utama terhadap data pertahun, kemudian menggunakan vektor ciri atau koefisien a_{ij} yang diperoleh melalui Analisis komponen utama untuk memperoleh k skor komponen utama (W) tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.
8. Mengelompokan kabupaten/kota berdasarkan kategori besar kecilnya perubahan.

Kategori kelompok tingkat kesejahteraan rakyat masing-masing kabupaten/kota ke- h dapat dinotasikan sebagai berikut :

- Tinggi, jika $y_{h1} > \bar{y}_1 + s_{y1}$
Merupakan daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinannya paling parah di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016.
- Sedang, jika $\bar{y}_1 - s_{y1} \leq y_{h1} \leq \bar{y}_1 + s_{y1}$
Merupakan daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinannya stabil di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016.
- Rendah, jika $y_{h1} < \bar{y}_1 - s_{y1}$

Merupakan daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinannya baik karena terjadi penurunan di dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh kurun waktu 2012-2016 (Vincent, 1992).

9. Menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari pengelompokan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.
10. Membuat peta pengelompokan tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.

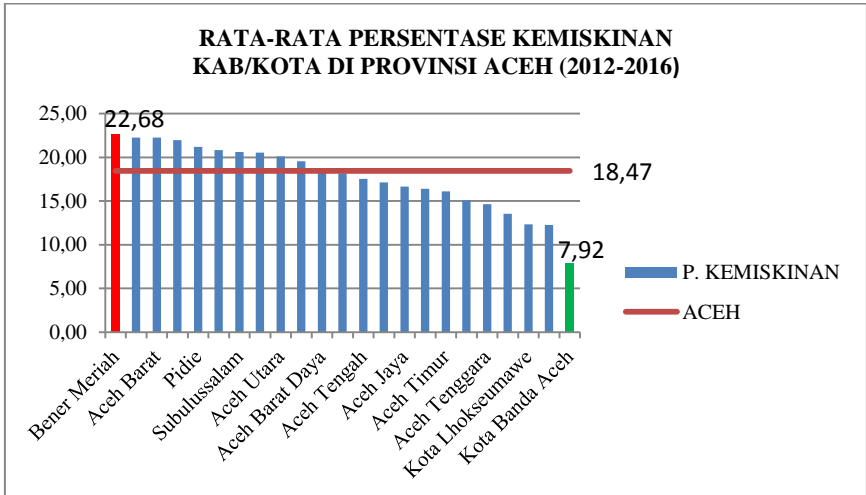
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistika Deskriptif

4.1.1 Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang yang berada dibawah garis kemiskinan. Gambar 4.1 akan menjelaskan keadaan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2012-2016.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 4.1. Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh

Pada Gambar 4.1. menunjukkan rata-rata persentase penduduk miskin kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni tahun 2012-2016. Kabupaten Bener Meriah yang memiliki rata-rata persentase penduduk miskinnya paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar 22,68%. Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, yang tercantum dalam undang- undang No. 41 tahun 2003 tepatnya tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang ibukotanya di Simpang Tiga Redelong. Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa.

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah yaitu sektor perkebunan dan jasa. Komoditi unggulan dari sektor perkebunan adalah kopi, kakao, tebu, kelapa, nilam dan hampir segala jenis tanaman hortikultura tumbuh subur di sepanjang wilayah Kabupaten Bener Meriah seperti cabai, kentang, kubis dan sayuran lainnya. Adapun sektor jasa pariwisata yaitu wisata alam dan budaya, gunung merapi Burni Telong menjadi tujuan wisata yang banyak dikunjungi baik turis maupun masyarakat lokal, dari gunung merapi tersebut terdapat pula kolam pemandian air panas yang ada di desa Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam. Dari segi

budayanya, kerawang gayo merupakan pakaian adat gayo yang biasanya dipakai pada acara-acara sakral seperti pernikahan dan sunatan Rasul. Pakaian ini dapat dijadikan buah tangan yang indah apabila berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah.

Hal ini berbanding terbalik dengan rata-rata persentase penduduk miskin yang ada di Provinsi Aceh, yang mana Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah paling tinggi rata-rata persentase penduduk miskin dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemanfaatan lahan pertanian yang ada serta tata kelola pemerintahan yang belum tepat sasaran. Seharusnya dengan luas lahan tanaman lebih dari 43 ribu hektar masyarakat di Kabupaten Bener Meriah tidak berada di tingkat pertama dalam rata-rata persentase tingkat kemiskinan penduduk.

Selain itu yang menjadi sebab tingginya persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bener Meriah adalah rendahnya tingkat pendidikan serta teknologi yang ada di kabupaten tersebut, hal ini berpengaruh pada rendahnya daya saing masyarakat dalam mengelola perekonomian. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dominannya bekerja sebagai petani, setiap musim tanam masyarakat di Kabupaten Bener Meriah sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Apabila iklim dan cuaca baik maka hasil panen pun akan baik. Sebaliknya Kota Banda Aceh memiliki rata-rata persentase penduduk miskinnya sedikit yaitu sebesar 7,92% dari tahun 2012 sampai 2016. Kota Banda Aceh

merupakan ibukota dari Provinsi Aceh, daerah yang berada diujung pulau sumatera ini di kenal dengan daerah Koetaradja. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61,36 Km² terdiri dari 9 kecamatan dan 90 desa. Jika ditinjau dari letak geografisnya, sebelah utara Kota Banda Aceh berbatasan dengan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Dilihat dari letak wilayahnya, komoditi unggulan di wilayah Kota Banda Aceh yaitu perikanan, bisa dilihat dari nilai produksi perikanan hasil laut pada tahun 2015 yang mencapai 111,76 milyar rupiah sedangkan dari hasil budidayanya berjumlah 5,19 milyar rupiah. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh. Selain itu, Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh artinya segala sesuatu baik dari segi ekonomi, pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sebagainya berpusat di Kota Banda Aceh.

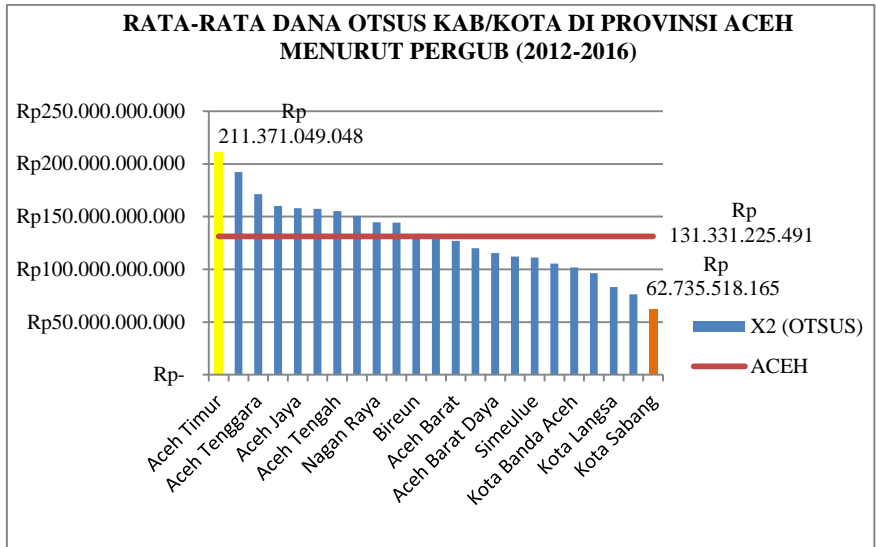
Kota Banda Aceh merupakan pusat pendidikan di Provinsi Aceh baik tingkat dasar hingga perguruan tinggi, teknologi yang memadai serta pendidikan yang baik menjadi salah satu faktor keunggulan Kota Banda Aceh di Bandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh. Kebanyakan penduduk dari daerah lain yang ada di Provinsi Aceh mencari pekerjaan di Kota Banda Aceh seperti berdagang, dan berkerja di perusahaan negara maupun

swasta. Hal ini sangat membantu menumbuhkan perekonomian yang ada di Kota Banda Aceh.

Rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 18,47% dari tahun 2012 sampai 2016. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh maka dapat dilihat ada beberapa daerah yang berada diatas garis rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan raya, Kota Subulussalam, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Singkil. Adapun daerah yang memiliki rata-rata persentase kemiskinannya dibawah garis Provinsi aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Sabang, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa dan Kota Banda Aceh.

4.1.2 Rata-Rata Dana Otsus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Dana Otsus merupakan salah satu indikator dalam mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi dalam pendistribusiannya cenderung mengalami fluktuatif setiap tahunnya, seperti yang terdapat pada gambar 4.2.



Sumber: BAPPEDA (diolah)

Gambar 4.2. Rata-Rata Jumlah Dana Otsus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

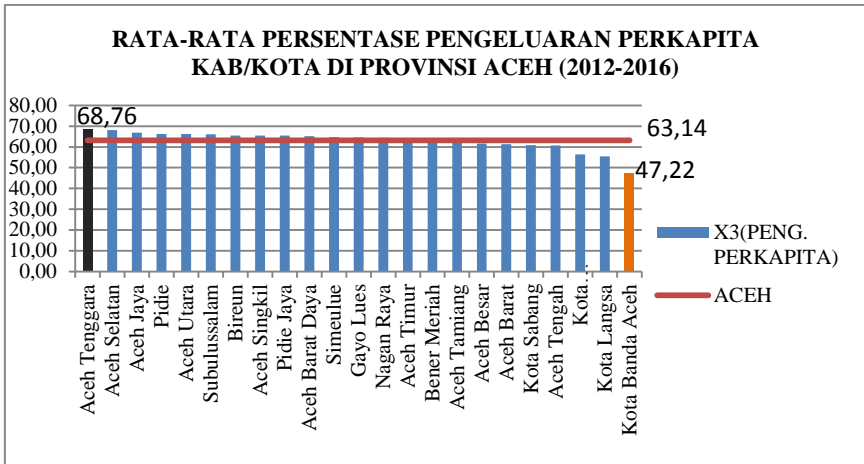
Pada gambar 4.2. menunjukkan rata-rata jumlah dana otsus yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2012 sampai 2016. Kabupaten Aceh Timur yang memiliki rata-rata jumlah dana otsus yang diterima paling tinggi dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 211.371.049.048,- Sedangkan Kota Sabang yang memiliki rata-rata jumlah dana otsus yang diterima paling rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 62.735.518.165,-

Pada gambar 4.2. juga disebutkan rata-rata jumlah dana otsus yang diterima Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 131.331.225.491,- Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang

ada di Provinsi Aceh, maka dapat dilihat ada beberapa daerah yang berada diatas garis rata-rata jumlah dana otsus Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara, Dan Kabupaten Bireuen. Sementara kabupaten/kota yang berada dibawah rata-rata jumlah dana otsus provinsi aceh yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Subulussalam, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang.

4.1.3 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Pengeluaran perkapita menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Rata-rata persentase pengeluaran perkapita Provinsi Aceh sebesar 63,14%. Pada gambar 4.3 akan dijelaskan rata-rata persentase pengeluaran perkapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh.



Sumber: BPS (diolah penulis)

Gambar 4.3. Rata-Rata Persentase Pengeluaran Perkapita Kab/Kota di Provinsi Aceh

Pada gambar 4.3. menunjukkan rata-rata persentase pengeluaran perkapita Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2012-2016. Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki rata-rata persentase pengeluaran perkapitanya paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar 68,76%. Jika di tinjau dari geografisnya, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas wilayah 4.231,43 km² terdiri dari 16 Kecamatan 385 Desa dengan batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Komoditi unggulan dari Kabupaten Aceh Tenggara yaitu kakao (Coklat), kemiri, padi. Komoditi unggulan lainnya adalah karet, kayu glondongan, ikan air tawar, durian, rambutan dan alpukat. Adapun yang menjadi pendapatan bagi masyarakat Aceh Tenggara yaitu dari segi objek wisatanya. Ada beberapa objek wisata di Aceh Tenggara yaitu Benteng Kuta Reh, Taman Nasional Gunung Leuser, Arung Jeram Sungai Alas, Air Terjun Lawe Dua, Festival Seni Gayo-Alas, Bukit Cinta (Bukit Mbarung), Pemandian Kolam air panas Lawe Ger-ger, Jamur Mamang, Pantai Goyang, Taman Kota, dan Masjid Agung At-Taqwa. Sebaliknya Kota Banda Aceh yang memiliki rata-rata persentase pengeluaran perkapitanya paling rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar 47,22%.

4.2 Pengelompokan Kabupaten/kota Berdasarkan Tingkat Kemiskinan

Analisa data tingkat kemiskinan tidak dapat diketahui masing-masing kabupaten/kota, sehingga dilakukan analisa terhadap data pertahun untuk menentukan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota serta melihat ada tidaknya perubahan tingkat kemiskinan setiap tahunnya. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa korelasi yang tinggi antar peubah bebas yang mengindikasikan adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dapat diatasi dengan Analisis Komponen Utama (AKU).

Dari tahapan analisa data rata-rata dengan asumsi bahwa KU_1 sudah mewakili keragaman KU lainnya karena memiliki nilai akar ciri tertinggi yang tidak lain adalah nilai keragaman yang ada pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Komponen Utama (KU_1) data dari tahun 2012 sampai tahun 2016

Peubah	KU1 2012	KU1 2013	KU1 2014	KU1 2015	KU1 2016
Z1	0,545	0,528	0,595	0,58	0,557
Z2	0,498	0,527	0,431	0,439	0,468
Z3	0,674	0,666	0,679	0,687	0,686
Akar Cirri	1,717	1,721	1,705	1,706	1,711

Dari tabel 4.1. proses pengelompokan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh cukup dipergunakan satu buah KU dari tahun 2012 sampai tahun 2016 yaitu KU_1 .

Dengan demikian proses pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat perubahan indikator tingkat kemiskinan dapat diukur dengan besar-kecilnya skor komponen utama pertama (W_1) yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang memiliki skor komponen utama pertama (W_1) yang rendah. Skor komponen utama pertama (W_1) masing-masing

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Skor komponen utama pertama (W_1)

No.	Kabupaten/Kota	W2012	W2013	W2014	W2015	W2016
1	Simeulue	0,449432033	0,521152591	0,531799414	0,206077766	0,238463715
2	Aceh Singkil	0,35385151	0,480566325	0,385745189	0,653216764	0,474706904
3	Aceh Selatan	0,309603709	0,591273671	0,447114478	0,430473948	0,530417861
4	Aceh Tenggara	0,880243651	0,955000689	0,667897674	1,029896702	0,740168105
5	Aceh Timur	1,156031204	1,118689546	0,83116432	0,643418488	0,737460915
6	Aceh Tengah	-0,258711335	0,067048753	0,011619652	-0,120341462	0,066984302
7	Aceh Barat	0,470698677	0,500207013	0,77668731	0,049354022	0,010525762
8	Aceh Besar	-0,261858643	-0,046231421	-0,335427082	-0,163225709	0,117896337
9	Pidie	1,105957857	1,330510162	1,15842028	1,25765304	1,505834613
10	Bireuen	0,438387004	0,328254933	0,389168656	0,116051245	0,118267397
11	Aceh Utara	0,73014525	0,971425505	0,903874457	0,980667386	1,098304814
12	Aceh Barat Daya	0,240532654	0,04787844	0,220611506	0,397475098	-0,009741746
13	Gayo Lues	1,378968996	1,238384047	1,668317826	1,732551488	1,972821191
14	Aceh Tamiang	-0,591353476	-0,440375655	-0,71389971	-0,464385966	-0,336289862
15	Nagan Raya	1,468230901	0,764605666	0,626958338	0,576085725	0,660886377
16	Aceh Jaya	0,621074657	0,648659016	0,620006777	0,850120736	0,801376981
17	Bener Meriah	0,266406147	0,367389236	0,414962817	0,466733673	0,231616594
18	Pidie Jaya	0,412855228	0,217074576	0,730520624	0,654258882	0,649767043
19	Banda Aceh	-4,076862734	-4,359624131	-3,90787665	-3,906115979	-3,659992854
20	Sabang	-0,842346244	-0,975364037	-1,021692085	-1,225918896	-1,438159645
21	Langsa	-2,297797152	-2,394360923	-2,306656398	-2,450853521	-2,775802114
22	Lhokseumawe	-2,647212226	-2,391275331	-2,472538374	-2,194928738	-2,256444448
23	Subulussalam	0,693722332	0,45911133	0,373220981	0,481735308	0,520931759
	Rata-rata	-6,46826E-16	-1,44812E-17	1,36847E-15	-5,45457E-16	1,60258E-15
	Simpangan Baku	1,34892159	1,358994525	1	1,307713208	1,335756784

Keterangan :

W2012 = Skor komponen utama pertama (W_1) tahun 2012

W2013 = Skor komponen utama pertama (W_1) tahun 2013

W2014 = Skor komponen utama pertama (W_1) tahun 2014

W2015 = Skor komponen utama pertama (W_1) tahun 2015

W2016 = Skor komponen utama pertama (W_1) tahun 2016

Dengan menggunakan skor komponen utama pertama (W_1) pada tabel 4.7, maka pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan dapat dilakukan melalui kelompok kategori tingkat kemiskinan yang telah dijelaskan pada....

Alokasi kabupaten/kota ke- h di Provinsi Aceh dalam kelompok perubahan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut :

4.2.1 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012

- tinggi, jika $y_{h1} > 1,34892159$
- sedang, jika $y_{h1} < 1,34892159$
- rendah, jika $y_{h1} < -1,34892159$

Catatan : y_{h1} adalah skor komponen utama pertama (W_1) dari kabupaten ke- h

$$(h = 1, 2, 3, \dots, 23).$$

Berdasarkan kriteria pengelompokan yang ditetapkan serta memperhatikan hasil skor komponen pertama (W_1) pada tabel 4.2., maka 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok berdasarkan tingkat kemiskinan tahun 2012 pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkatkemiskinan 2012

	Kelompok rendah	Kelompok Sedang	Kelompok Tinggi
	19 (-4,076862733645)	1 (0,449432032932212)	13 (1,37896899566794)
	21 (-2,29779715191248)	2 (0,353851510460688)	15 (1,46823090077613)
	22 (-2,64721222595021)	3 (0,309603708531278)	
		4 (0,880243651318958)	
		5 (1,15603120412487)	
		6 (-0,258711335053836)	
		7 (0,470698676663557)	
		8 (-0,261858642778298)	
		9 (1,105957857159)	
		10 (0,438387003981961)	
		11 (0,730145249883056)	
		12 (0,240532653646829)	
		14 (-0,591353475745562)	
		16 (0,62107465718613)	
		17 (0,266406146649515)	
		18 (0,412855228191669)	
		20 (-0,842346244439476)	
		23 (0,693722332351059)	
Jumlah	13,04%	78,26%	8,70%

Hasil pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat perubahan kemiskinan tahun 2012 yaitu :

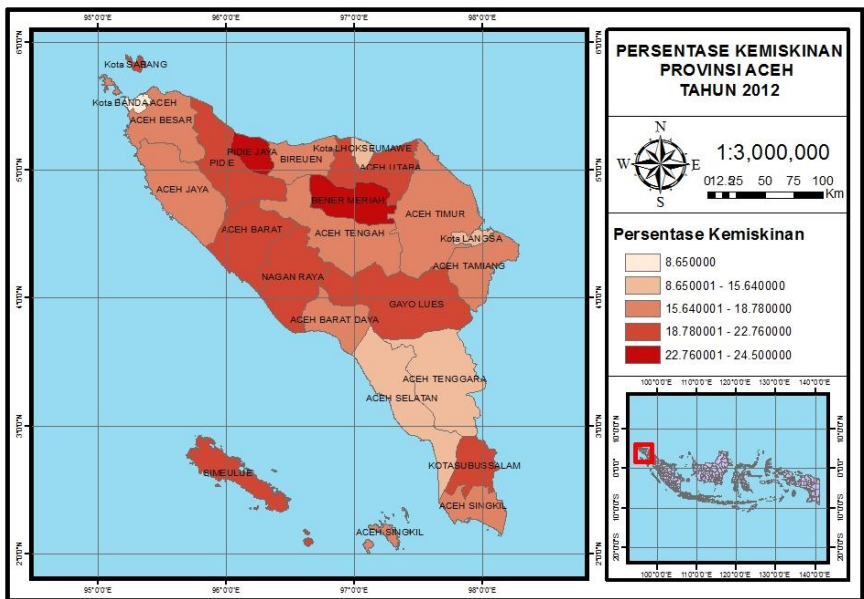
1. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Nagan Raya.

2. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang sedang yaitu Kabupaten Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
3. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

Untuk melihat daerah dengan persentase tingkat kemiskinan dari yang tertinggi sampai terendah maka kita dapat melihat dengan bantuan peta kontur, dimana variasi dari warna peta merupakan variasi antara tingkat kemiskinan tertinggi sampai terendah di 23 kabupaten/kota provinsi aceh.

4.2.2 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2012

Persentase tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di provinsi aceh digambarkan dalam peta kontur berikut.



Gambar 4.4. Peta kontur persentase tingkat kemiskinan tahun 2012

Gambar 4.4. menunjukkan bahwa wilayah yang berwarna merah adalah wilayah dengan presentase kemiskinan paling tinggi, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan warna putih merupakan wilayah dengan presentase tingkat kemiskinan yang rendah, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

4.2.3 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013

- tinggi, jika $y_{h1} > 1,358994525$
- sedang, jika $y_{h1} < 1,358994525$
- rendah, jika $y_{h1} < -1,358994525$

Catatan : y_{h1} adalah skor komponen utama pertama (W_1) dari kabupaten ke- h

$$(h = 1, 2, 3, \dots, 23).$$

Berdasarkan kriteria pengelompokan yang ditetapkan serta memperhatikan hasil skor komponen pertama (W_1) pada tabel 4.2, maka 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok berdasarkan tingkat kemiskinan tahun 2013 pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan 2013

	Kelompok rendah	Kelompok Sedang	Kelompok Tinggi
	19 (-4,35962413063441)	1 (0,521152591117908)	
	21 (-2,39436092344284)	2 (0,480566325323669)	
	22 (-2,3912753314892)	3 (0,591273670741025)	
		4 (0,955000688935709)	
		5 (1,11868954550145)	
		6 (0,0670487527020576)	
		7 (0,500207012516094)	
		8 (-0,0462314210489639)	
		9 (1,33051016194791)	
		10 (0,328254933254232)	
		11 (0,971425505311379)	
		12 (0,0478784402721447)	
		13 (1,23838404675333)	
		14 (-0,440375654711396)	
		15 (0,764605665841985)	
		16 (0,648659016375784)	
		17 (0,367389235784978)	
		18 (0,217074576166742)	
		20 (-0,975364037222048)	
		23 (0,459111330002468)	
Jumlah	13,04%	86,96%	0%

Hasil pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat perubahan kemiskinan tahun 2013 yaitu :

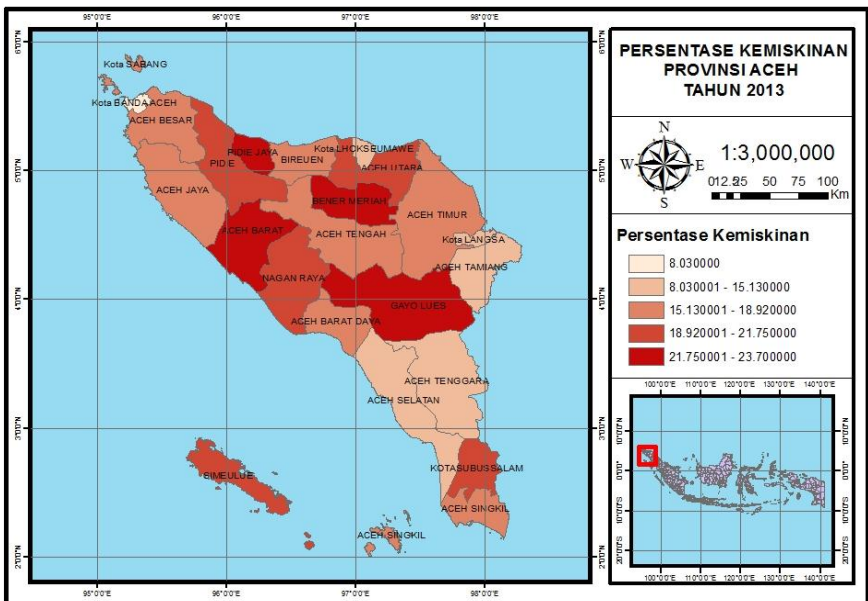
1. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tidak ada.

2. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kesejahteraan sedang yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
3. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

Untuk melihat daerah dengan persentase tingkat kemiskinan dari yang tertinggi sampai terendah maka kita dapat melihat dengan bantuan peta kontur, dimana variasi dari warna peta merupakan variasi antara tingkat kemiskinan tertinggi sampai terendah di 23 kabupaten/kota provinsi aceh.

4.2.4 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2013

Persentase tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di provinsi aceh digambarkan dalam peta kontur berikut.



Gambar 4.5. Peta kontur persentase tingkat kemiskinan tahun 2013

Gambar 4.5. menunjukkan bahwa wilayah yang berwarna merah adalah wilayah dengan presentase kemiskinan paling tinggi, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan warna putih merupakan wilayah dengan

presentase tingkat kemiskinan yang rendah, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

4.2.5 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2014

- tinggi, jika $y_{h1} > 1,305728909$
- sedang, jika $y_{h1} < 1,305728909$
- rendah, jika $y_{h1} < -1,305728909$

Catatan : y_{h1} adalah skor komponen utama pertama (W_1) dari kabupaten ke- h

$$(h = 1, 2, 3, \dots, 23).$$

Berdasarkan kriteria pengelompokan yang ditetapkan serta memperhatikan hasil skor komponen pertama (W_1) pada tabel 4.2., maka 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok berdasarkan tingkat kemiskinan tahun 2014 pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan 2014

	Kelompok rendah	Kelompok Sedang	Kelompok Tinggi
	19 (-3,90787665036517)	1 (0,531799413568735)	13 (1,66831782575666)
	21 (-2,30665639808958)	2 (0,385745189236025)	
	22 (-2,4725383737928)	3 (0,447114477894638)	
		4 (0,667897674237967)	
		5 (0,831164320131045)	
		6 (0,0116196523879821)	
		7 (0,776687310476173)	
		8 (-0,335427082023235)	
		9 (1,15842028032763)	
		10 (0,389168655836587)	
		11 (0,903874457068835)	
		12 (0,220611505719473)	
		14 (-0,713899710306373)	
		15 (0,626958338307968)	
		16 (0,620006777113313)	
		17 (0,414962816846339)	
		18 (0,730520623858657)	
		20 (-1,02169208505766)	
		23 (0,373220980866819)	
Jumlah	13,04%	82,61%	4,35%

Hasil pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat perubahan kemiskinan tahun 2014 yaitu :

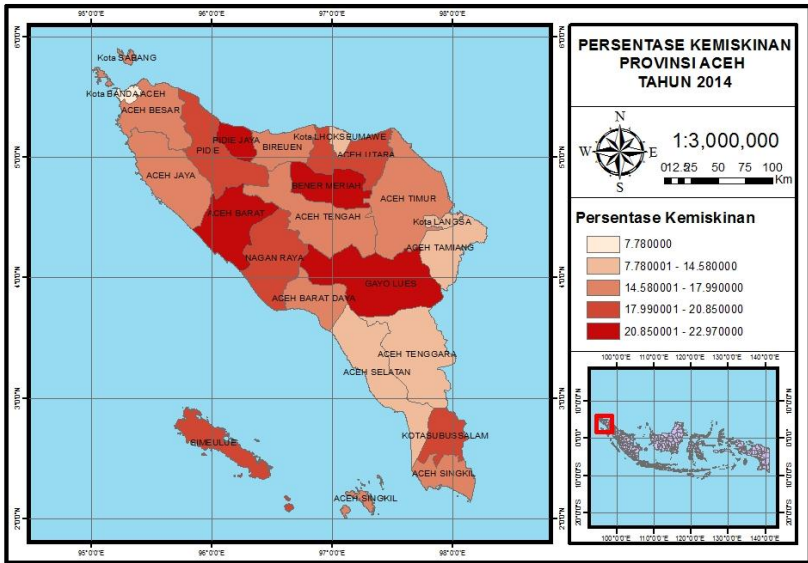
1. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu Kabupaten Gayo Lues.

2. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan sedang yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
3. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

Untuk melihat daerah dengan persentase tingkat kemiskinan dari yang tertinggi sampai terendah maka kita dapat melihat dengan bantuan peta kontur, dimana variasi dari warna peta merupakan variasi antara tingkat kemiskinan tertinggi sampai terendah di 23 kabupaten/kota provinsi aceh.

4.2.6 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2014

Persentase tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di provinsi aceh digambarkan dalam peta kontur berikut.



Gambar 4.6. Peta kontur presentase tingkat kemiskinan tahun 2014

Gambar 4.6. menunjukkan bahwa wilayah yang berwarna merah adalah wilayah dengan presentase kemiskinan paling tinggi, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan warna putih merupakan wilayah dengan presentase tingkat kemiskinan yang rendah, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

4.2.7 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2015

- tinggi, jika $y_{h1} > 1,307713208$

- sedang, jika $y_{h1} < 1,307713208$
- rendah, jika $y_{h1} < -1,307713208$

Catatan : y_{h1} adalah skor komponen utama pertama (W_1) dari kabupaten ke- h

$$(h = 1, 2, 3, \dots, 23).$$

Berdasarkan kriteria pengelompokan yang ditetapkan serta memperhatikan hasil skor komponen pertama (W_1) pada tabel 4.2., maka 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok berdasarkan tingkat kemiskinan tahun 2015 pada tabel 4.6

Tabel 4.6. Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan 2015

	Kelompok rendah	Kelompok Sedang	Kelompok Tinggi
	19 (-3,9061159785644)	1 (0,206077766377881)	13 (1,73255148759915)
	21 (-2,45085352134558)	2 (0,653216764290707)	
	22 (-2,19492873750868)	3 (0,430473947777789)	
		4 (1,02989670156165)	
		5 (0,643418488020841)	
		6 (-0,120341461731491)	
		7 (0,0493540217494013)	
		8 (-0,163225709240797)	
		9 (1,25765303983729)	
		10 (0,116051245179912)	
		11 (0,980667385968365)	
		12 (0,397475097951447)	
		14 (-0,464385966191206)	
		15 (0,576085724793737)	
		16 (0,850120735897855)	
		17 (0,466733672848358)	
		18 (0,65425888194996)	
		20 (-1,22591889552475)	
		23 (0,481735308302558)	
Jumlah	13,04%	82,61%	4,35%

Hasil pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat perubahan kemiskinan tahun 2015 yaitu :

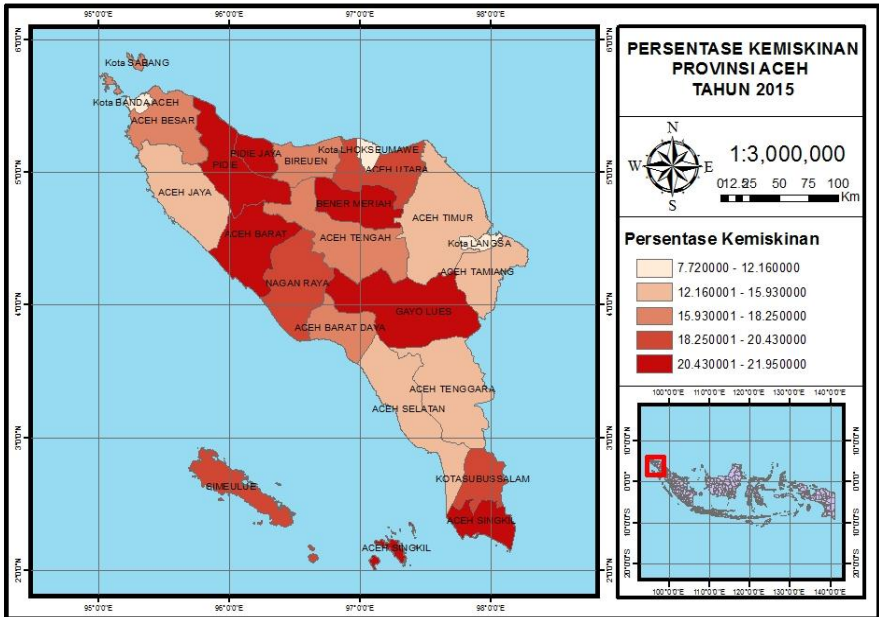
1. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu Kabupaten Gayo Lues.

2. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan sedang yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
3. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kesejahteraan rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

Untuk melihat daerah dengan persentase tingkat kemiskinan dari yang tertinggi sampai terendah maka kita dapat melihat dengan bantuan peta kontur, dimana variasi dari warna peta merupakan variasi antara tingkat kemiskinan tertinggi sampai terendah di 23 kabupaten/kota provinsi aceh.

4.2.8 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2015

Persentase tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di provinsi aceh digambarkan dalam peta kontur berikut.



Gambar 4.7. Peta kontur presentase tingkat kemiskinan tahun 2015

Gambar 4.7. menunjukkan bahwa wilayah yang berwarna merah adalah wilayah dengan presentase kemiskinan paling tinggi, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan warna putih merupakan wilayah dengan presentase tingkat kemiskinan yang rendah, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

4.2.9 Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2016

- tinggi, jika $y_{h1} > 1,335756784$
- sedang, jika $y_{h1} < 1,335756784$
- rendah, jika $y_{h1} < -1,335756784$

Catatan : y_{h1} adalah skor komponen utama pertama (W_1) dari kabupaten ke- h

$$(h = 1, 2, 3, \dots, 23).$$

Berdasarkan kriteria pengelompokan yang ditetapkan serta memperhatikan hasil skor komponen pertama (W_1) pada tabel 4.2, maka 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok berdasarkan tingkat kemiskinan tahun 2016 pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan 2016

	Kelompok rendah	Kelompok Sedang	Kelompok Tinggi
	19 (-3,65999285404035)	1 (0,238463714657001)	9 (1,50583461268173)
	20 (-1,43815964531818)	2 (0,474706903639805)	13 (1,97282119106441)
	21 (-2,77580211391659)	3 (0,530417861483076)	
	22 (-2,25644444776959)	4 (0,740168105196295)	
		5 (0,737460915479978)	
		6 (0,0669843024333355)	
		7 (0,0105257619603659)	
		8 (0,117896336502553)	
		10 (0,118267396837561)	
		11 (1,09830481364808)	
		12 (-0,00974174564004837)	
		14 (-0,336289862392976)	
		15 (0,660886376794382)	
		16 (0,801376981477607)	
		17 (0,231616593589203)	
		18 (0,649767042935329)	
		23 (0,520931758697055)	
Jumlah	17,39%	73,91%	8,70%

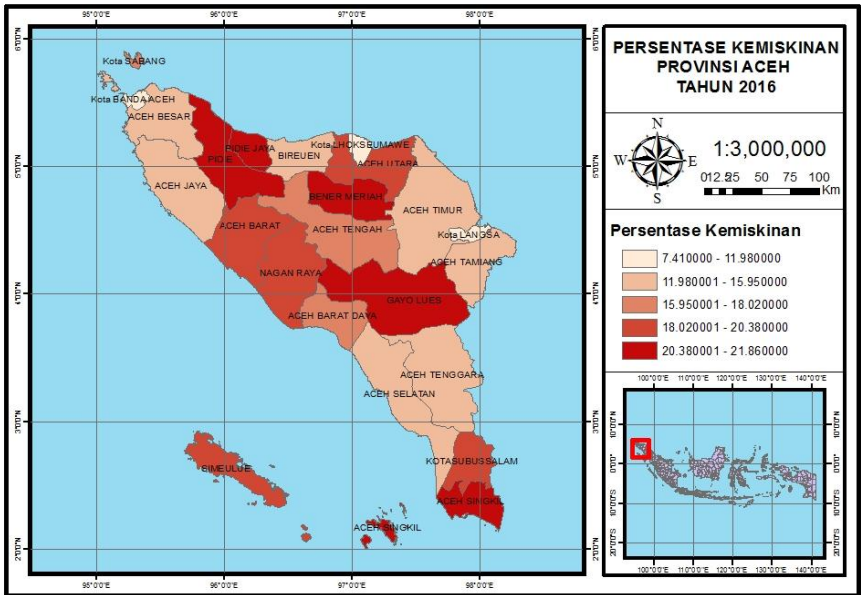
Hasil pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat perubahan kemiskinan tahun 2016 yaitu :

1. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Gayo Lues.
2. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan sedang yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam.
3. Kelompok kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe

Untuk melihat daerah dengan persentase tingkat kemiskinan dari yang tertinggi sampai terendah maka kita dapat melihat dengan bantuan peta kontur, dimana variasi dari warna peta merupakan variasi antara tingkat kemiskinan tertinggi sampai terendah di 23 kabupaten/kota provinsi aceh.

4.2.10 Persebaran Tingkat Kemiskinan Aceh Tahun 2016

Persentase tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di provinsi aceh digambarkan dalam peta kontur berikut.



Gambar 4.8. Peta kontur presentase tingkat kemiskinan tahun 2016

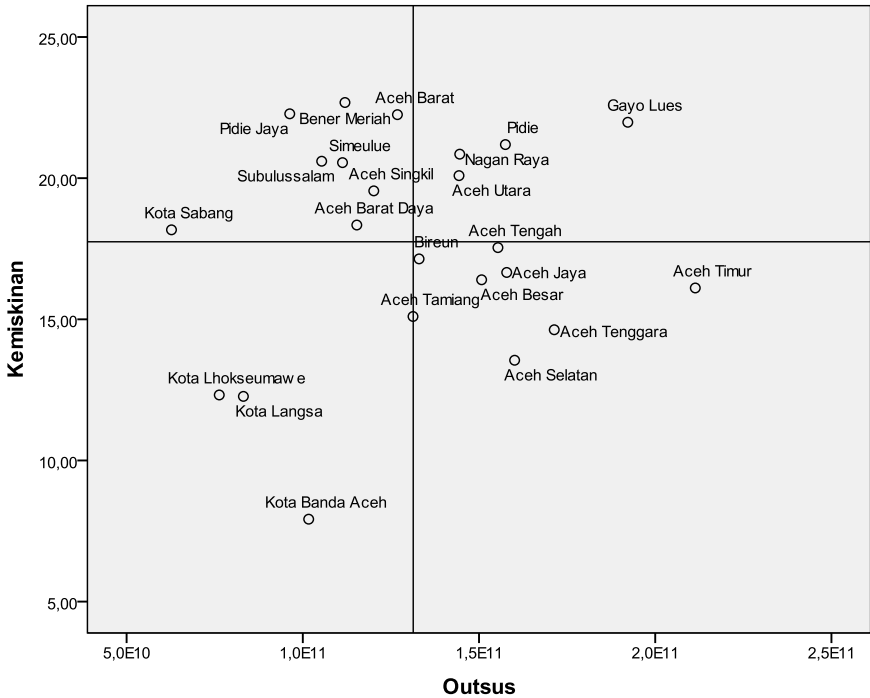
Gambar 4.8. menunjukkan bahwa wilayah yang berwarna merah adalah wilayah dengan presentase kemiskinan paling tinggi, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan warna putih merupakan wilayah dengan presentase tingkat kemiskinan yang rendah, adapun yang meliputi wilayah tersebut yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Aceh Tenggara.

4.3 Gambaran Hubungan Antara Dana Otsus dan PengeluaranPerkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2012-2016.

Adapun gambaran hubungan antara dana otsus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan menjadi tolak ukur dalam hasil penelitian ini. Besar atau kecilnya hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

4.3.1 Hubungan Antara Dana Otsus Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.

Jika ditinjau dari tujuannya, salah satu tujuan dana otsus untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh. Pada gambar dibawah akan dijelaskan hasil dari penelitian ini mengenai seberapa besar hubungan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.



Gambar 4.9 hubungan antara dana otsus terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh

Pada kuadran pertama menjelaskan bahwa dana otsus meningkat tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini memberikan gambaran buruk karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya dengan dana otsus yang meningkat tingkat kemiskinannya juga semakin berkurang. Adapun penyebabnya karena korupsi dan tata kelola dana otonomi khusus yang belum baik sehingga terjadi tingginya tingkat kemiskinan. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran pertama yaitu Kabupaten Gayo

Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Tengah.

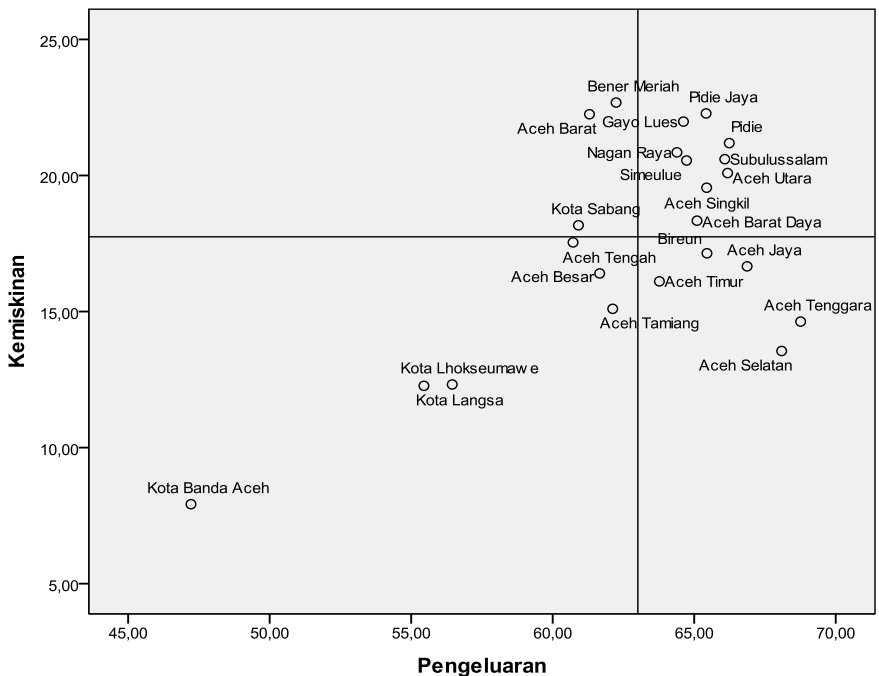
Pada kuadran kedua menjelaskan bahwa dana otsus sedikit tingkat kemiskinannya tinggi. Hal ini tentu menjadi acuan untuk menambah jumlah dana otsus agar tingkat kemiskinannya menurun. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran kedua yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.

Pada kuadran ketiga menjelaskan bahwa dana otsus sedikit tingkat kemiskinannya menurun. Dalam kuadran ini dianggap sangat baik, karena dengan dana otsus yang sedikit kemiskinannya juga menurun. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ketiga yaitu Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh.

Pada kuadran keempat menjelaskan bahwa dana otsus meningkat tingkat kemiskinannya menurun. Dalam kuadran keempat ini sangat baik, karena berhasil memanfaatkan dana otsus untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran keempat yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Tamiang berada diantara kuadran ketiga dan kuadran keempat.

4.3.2 Hubungan Antara Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh

Pengeluaran perkapita melambangkan tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan disuatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok baik dari segi makanan maupun non-makanan. Pada gambar dibawah akan dijelaskan hasil dari penelitian ini mengenai seberapa besar pengaruh pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.



Gambar 4.10 hubungan antara pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh

Pada kuadran pertama menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita meningkat tingkat kemiskinannya juga tinggi. Dalam hal ini memberikan gambaran buruk, seharusnya dengan pengeluaran perkapita yang tinggi kemiskinan juga menurun. Adapun penyebabnya karena daya beli masyarakat yang berkurang sehingga terjadi tingginya tingkat kemiskinan akibat dari ketidakmampuan masyarakat dalam membeli barang. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran pertama yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kota Subulussalam.

Pada kuadran kedua menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita sedikit tingkat kemiskinannya meningkat. Dalam hal ini memberi gambaran buruk pula seharusnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan maka pengeluaran perkapita juga harus meningkat sehingga terjadi perputaran roda perekonomian yang baik. Adapun kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran kedua yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat, dan Kota Sabang.

Pada kuadran ketiga menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita sedikit tingkat kemiskinannya menurun. Pada kuadran ini memberi gambaran yang baik karena dengan pengeluaran perkapita

yang sedikit mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran perkapita melambangkan kemampuan daya beli masyarakat untuk konsumsi. Alangkah lebih baiknya lagi apabila pengeluaran perkapita tinggi tingkat kemiskinannya rendah. Adapun kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ketiga yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Banda Aceh.

Pada kuadran keempat menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita meningkat tingkat kemiskinannya rendah. Dalam kuadran ini sangat baik, karena pengeluaran perkapitanya tinggi tingkat kemiskinannya juga rendah. Sehingga terjadi perputaran roda perekonomian yang bagus. Adapun kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran keempat yaitu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Selatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Analisa data dengan analisis komponen utama (AKU) dan analisis *cluster* untuk analisa data rata-rata tingkat kemiskinan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini ialah:

- 1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Gayo Lues, sedangkan daerah dengan kategori tingkat kemiskinan yang rendah dari tahun 2012-2016 yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe, selebihnya berada pada kategori sedang. Namun pada tahun 2016 Kabupaten Pidie Mengalami perubahan yang sebelumnya berada pada kategori sedang masuk dalam kategori tinggi.
- 2) Persebaran tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa daerah yang berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi dari tahun 2012-2016 yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan daerah yang

berada pada tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun daerah yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Bireun.

- 3) Ada hubungan kuat antara dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan ditandai dengan banyaknya kabupaten/kota yang berada pada kuadran I. Artinya semakin tinggi dana otonomi khusus dan pengeluaran perkapita, tingkat kemiskinan juga semakin tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena tata kelola dana otonomi khusus kabupaten/kota yang belum tepat sasaran.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan pada penelitian ini ialah:

- 1) Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kabupaten/kota yang berada dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi.
- 2) Pendistribusian dana otonomi khusus harus dapat dikontrol dengan baik, sehingga tepat guna. Peningkatan dan penurunan pengeluaran perkapita menjadi pola penting yang menjadi catatan dalam proses pembangunan yang adil dan merata.

- 3) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil variabel yang lebih banyak untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh.
- 4) Diharapkan untuk pemerintah Aceh kedepannya agar melakukan pembangunan lebih merata.
- 5) Alangkah baiknya daerah yang tergolong dalam kategori tingkat kemiskinan yang tinggi dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie diberi bantuan pupuk, bibit, mesin penggiling dan sebagainya agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membangun produktifitas sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farmawi, Abdul Hayy. (1994). *Metode Tafsir Muwdu'iy (Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudlu'I)*. Suryana A. Jamrah (penj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Alquran dan hadist

Arif Mudayat, Aris. (1996) *Ulama dan Uleebalang di Aceh! Konsistensi ideologi islam. Dalam kisah dari kampung halaman, masyarakat suku, agama resmi dan pembangunan.* Jakarta: Interfdei.

Aceh Dalam Angka. (2014) Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Haris , Syamsudin. (1999) *Indonesia di Ambang Perpecahan.* Jakarta: Erlangga.

Huda, Nurul. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Iriansyah , Nova. (2016) *Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan dan Kemandirian Bagi Kota Otonomi Khusus. Banda Aceh.*

Kholis, Nur. (2014) “*pendidikan islam dalam usaha mengatasi kemiskinan.*” Kependidikan 1-14

M. H. A. Laimheheriwa. (2013) Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota

Dan Kabupaten Provinsi Papua [skripsi]. Salatiga (ID):
Universitas Kristen Satya Wacana.

Nurhayani (2012). *Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita Di Kabupaten Batanghari* [jurnal]. Jambi (ID):
Universitas Jambi

Nurwati, Nunung (2008). *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan* [jurnal]. Bandung (ID): Universitas Padjadjaran.

Prawoto, Nano (2009). *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya* [jurnal]. Yogyakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Purwanto, E. A (2007) *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia* [jurnal]. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat*. Alih Bahasa Narulita, Sari. Jakarta: Zikrul Hakim.

S. Warouw, G. Nangoy, Treesje. (2016) *Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di Provinsi*

Papua Barat [skripsi]. Manado (ID): Universitas Sam Ratulangi.

Syahda Guru LS , *Menimbang otonomi vs federal*, PT.Remaja Rosdakarya Bandung:2000, hal.184

Wargadinata, Wildana. (2011) *Islam dan pengentasan kemiskinan*. UIN-Maliki Press, Malang.

Lampiran 1

**PERSENTASE KEMISKINAN
KAB/KOTA DI PROV. ACEH (2012-2016)**

NO	KAB/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Simeulue	21,88	20,57	19,92	20,43	19,93	20,55
2	Aceh Singkil	17,92	18,73	17,77	21,72	21,6	19,55
3	Aceh Selatan	14,81	13,44	12,79	13,24	13,48	13,55
4	Aceh Tenggara	15,64	14,39	13,75	14,91	14,46	14,63
5	Aceh Timur	17,19	16,59	15,88	15,85	15,06	16,11
6	Aceh Tengah	18,78	17,76	16,99	17,51	16,64	17,54
7	Aceh Barat	22,76	23,7	22,97	21,46	20,38	22,25
8	Aceh Besar	17,5	16,88	16,13	15,93	15,55	16,40
9	Pidie	22,12	21,12	20,29	21,18	21,25	21,19
10	Bireun	18,21	17,65	16,94	16,94	15,95	17,14
11	Aceh Utara	21,89	20,34	19,58	19,2	19,46	20,09
12	Aceh Barat Daya	18,51	18,92	17,99	18,25	18,03	18,34
13	Gayo Lues	22,31	22,33	21,43	21,95	21,86	21,98
14	Aceh Tamiang	16,7	15,13	14,58	14,57	14,51	15,10
15	Nagan Raya	22,27	21,75	20,85	20,13	19,25	20,85
16	Aceh Jaya	18,3	17,53	16,52	15,93	15,01	16,66
17	Bener Meriah	24,5	23,47	22,45	21,55	21,43	22,68
18	Pidie Jaya	24,35	22,7	21,78	21,4	21,18	22,28
19	Kota Banda Aceh	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41	7,92
20	Kota Sabang	20,51	18,31	17,02	17,69	17,33	18,17
21	Kota Langsa	13,93	12,62	12,08	11,62	11,09	12,27
22	Kota Lhokseumawe	13,06	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32
23	Subulussalam	22,64	20,69	19,72	20,39	19,57	20,60
	Aceh	20,98	19,48	18,08	17,08	16,73	18,47

Lampiran 2

**PERSENTASE PENGELUARAN PERKAPITA
KAB/KOTA DI PROV. ACEH (2012-2016)**

NO	KAB/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Simeulue	66,17	68,66	66,72	61,35	60,77	64,73
2	Aceh Singkil	68,03	69,5	67,34	62,56	59,76	65,44
3	Aceh Selatan	68,21	70,66	69,52	66,94	65,13	68,09
4	Aceh Tenggara	70,83	72,2	69,68	66,22	64,87	68,76
5	Aceh Timur	65,76	66,65	64,77	61,52	60,15	63,77
6	Aceh Tengah	61,65	63,27	62,16	58,31	58,22	60,72
7	Aceh Barat	64,43	63,99	63,25	57,53	57,28	61,30
8	Aceh Besar	62,51	63,97	60,84	60,22	60,77	61,66
9	Pidie	67,51	69,04	66,04	64,34	64,26	66,24
10	Bireun	67,64	67,66	66,68	63,03	62,22	65,45
11	Aceh Utara	64,93	66,99	67,11	66,46	65,42	66,18
12	Aceh Barat Daya	67,62	66,3	66,12	64,99	60,45	65,10
13	Gayo Lues	65,97	65,98	65,47	63,01	62,65	64,62
14	Aceh Tamiang	63,95	64,53	61,11	61,34	59,69	62,12
15	Nagan Raya	69,5	67,05	62,81	61,2	61,37	64,39
16	Aceh Jaya	67,37	67,55	67,07	66,9	65,45	66,87
17	Bener Meriah	63,71	64,42	62,66	61,74	58,66	62,24
18	Pidie Jaya	65,86	65,92	67,05	64,65	63,64	65,42
19	Kota Banda Aceh	52,25	48,09	47,26	44,12	44,37	47,22
20	Kota Sabang	63,68	65,06	62,57	57,74	55,5	60,91
21	Kota Langsa	58,42	57,9	56,85	53,7	50,37	55,45
22	Kota Lhokseumawe	57,42	58,67	56,5	55,71	53,95	56,45
23	Subulussalam	68,48	68,92	65,83	63,84	63,32	66,08
	Aceh	64,72	65,34	63,72	61,49	60,45	63,14

Lampiran 3

RATA-RATA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH (2012-2016)

NO	KAB/KOTA	P. KEMISKINAN	ACEH
1	Bener Meriah	22,68	18,47
2	Pidie Jaya	22,28	18,47
3	Aceh Barat	22,25	18,47
4	Gayo Lues	21,98	18,47
5	Pidie	21,19	18,47
6	Nagan Raya	20,85	18,47
7	Subulussalam	20,60	18,47
8	Simeulue	20,55	18,47
9	Aceh Utara	20,09	18,47
10	Aceh Singkil	19,55	18,47
11	Aceh Barat Daya	18,34	18,47
12	Kota Sabang	18,17	18,47
13	Aceh Tengah	17,54	18,47
14	Bireun	17,14	18,47
15	Aceh Jaya	16,66	18,47
16	Aceh Besar	16,40	18,47
17	Aceh Timur	16,11	18,47
18	Aceh Tamiang	15,10	18,47
19	Aceh Tenggara	14,63	18,47
20	Aceh Selatan	13,55	18,47
21	Kota Lhokseumawe	12,32	18,47
22	Kota Langsa	12,27	18,47
23	Kota Banda Aceh	7,92	18,47

Lampiran 4

**RATA-RATA DANA OTSUS KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH
MENURUT PERGUB (2012-2016)**

NO	KAB/KOTA	OTSUS	ACEH
1	Aceh Timur	Rp 211.371.049.048	Rp 131.331.225.491
2	Gayo Lues	Rp 192.217.839.294	Rp 131.331.225.491
3	Aceh Tenggara	Rp 171.348.179.853	Rp 131.331.225.491
4	Aceh Selatan	Rp 160.106.248.133	Rp 131.331.225.491
5	Aceh Jaya	Rp 157.855.085.795	Rp 131.331.225.491
6	Pidie	Rp 157.480.975.386	Rp 131.331.225.491
7	Aceh Tengah	Rp 155.364.567.484	Rp 131.331.225.491
8	Aceh Besar	Rp 150.737.735.690	Rp 131.331.225.491
9	Nagan Raya	Rp 144.531.075.713	Rp 131.331.225.491
10	Aceh Utara	Rp 144.322.799.161	Rp 131.331.225.491
11	Bireun	Rp 132.995.374.168	Rp 131.331.225.491
12	Aceh Tamiang	Rp 131.270.922.734	Rp 131.331.225.491
13	Aceh Barat	Rp 126.847.753.353	Rp 131.331.225.491
14	Aceh Singkil	Rp 120.137.923.973	Rp 131.331.225.491
15	Aceh Barat Daya	Rp 115.321.917.499	Rp 131.331.225.491
16	Bener Meriah	Rp 111.960.540.623	Rp 131.331.225.491
17	Simeulue	Rp 111.264.908.534	Rp 131.331.225.491
18	Subulussalam	Rp 105.356.641.739	Rp 131.331.225.491

19	Kota Banda Aceh	Rp 101.666.754.129	Rp 131.331.225.491
20	Pidie Jaya	Rp 96.293.142.170	Rp 131.331.225.491
21	Kota Langsa	Rp 83.137.162.822	Rp 131.331.225.491
22	Kota Lhokseumawe	Rp 76.294.070.831	Rp 131.331.225.491
23	Kota Sabang	Rp 62.735.518.165	Rp 131.331.225.491

Lampiran 5

RATA-RATA PERSENTASE PENGELUARAN PERKAPITA KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH (2012-2016)

NO	KAB/KOTA	X3(PENG. PERKAPITA)	ACEH
1	Aceh Tenggara	68,76	63,14
2	Aceh Selatan	68,09	63,14
3	Aceh Jaya	66,87	63,14
4	Pidie	66,24	63,14
5	Aceh Utara	66,18	63,14
6	Subulussalam	66,08	63,14
7	Bireun	65,45	63,14
8	Aceh Singkil	65,44	63,14
9	Pidie Jaya	65,42	63,14
10	Aceh Barat Daya	65,10	63,14
11	Simeulue	64,73	63,14
12	Gayo Lues	64,62	63,14
13	Nagan Raya	64,39	63,14
14	Aceh Timur	63,77	63,14
15	Bener Meriah	62,24	63,14
16	Aceh Tamiang	62,12	63,14
17	Aceh Besar	61,66	63,14

18	Aceh Barat	61,30	63,14
19	Kota Sabang	60,91	63,14
20	Aceh Tengah	60,72	63,14
21	Kota Lhokseumawe	56,45	63,14
22	Kota Langsa	55,45	63,14
23	Kota Banda Aceh	47,22	63,14

Lampiran 6

DANA OTSUS KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH MENURUT PERGUB (2012-2016)

No	KAB/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
		PERGUB ACEH TAHUN 2011	PERGUB ACEH TAHUN 2012	PERGUB ACEH TAHUN 2013	PERGUB ACEH TAHUN 2014	PERGUB ACEH NO. 7 TAHUN 2015	
1	Simeulue	106151786712	123803304936	105326444150	108490033837	112552973033	Rp 111.264.908.534
2	Aceh Singkil	116767957062	130744005985	113747315554	116337845137	123092496127	Rp 120.137.923.973
3	Aceh Selatan	141107340336	180662375651	158151037413	156731647778	163878839486	Rp 160.106.248.133
4	Aceh Tenggara	144032456686	183285909131	162405107409	194829969574	172187456465	Rp 171.348.179.853
5	Aceh Timur	203315357760	229572089071	204540812409	203304448098	216122537900	Rp 211.371.049.048
6	Aceh Tengah	135798267712	171801124648	151548782608	153029242798	164645419653	Rp 155.364.567.484
7	Aceh Barat	118179368304	137811790756	126032648587	125447783438	126767175679	Rp 126.847.753.353
8	Aceh Besar	138327928623	164966802758	148676787678	147914490241	153802669151	Rp 150.737.735.690
9	Pidie	134413543284	176071888941	160629520329	154825046044	161464878331	Rp 157.480.975.386
10	Bireun	124063252755	148549131596	132235242030	126659178409	133470066052	Rp 132.995.374.168
11	Aceh Utara	138766784896	177233160034	136328668055	132384928052	136900454768	Rp 144.322.799.161

12	Aceh Barat Daya	107873209046	128140347483	111022420534	111439098930	118134511504	Rp 115.321.917.499
13	Gayo Lues	168055431561	187734858157	195021178231	200855367107	209422361415	Rp 192.217.839.294
14	Aceh Tamiang	107646469694	146903529583	133953744076	126829640443	141021229875	Rp 131.270.922.734
15	Nagan Raya	136282859178	146705576546	145833596496	145845274513	147988071834	Rp 144.531.075.713
16	Aceh Jaya	138679171139	175261062131	152474420522	158425915563	164434859619	Rp 157.855.085.795
17	Bener Meriah	95558173264	125676693791	109243670794	111916310575	117407854689	Rp 111.960.540.623
18	Pidie Jaya	83710613753	106853327339	94216152766	96640402805	100045214188	Rp 96.293.142.170
19	Kota Banda Aceh	71225644829	85552246792	112551355724	117110295941	121894227358	Rp 101.666.754.129
20	Kota Sabang	57420816610	68856877380	60213985770	62331350724	64854560339	Rp 62.735.518.165
21	Kota Langsa	76623404861	90176414847	81666286361	81926615347	85293092694	Rp 83.137.162.822
22	Kota Lhokseumawe	71691684220	84158429359	73732980017	73902055739	77985204819	Rp 76.294.070.831
23	Subulussalam	90702375615	115252311485	104797081782	104164275991	111867163820	Rp 105.356.641.739
	Aceh	Rp 1.804.262.598.600	Rp 2.190.515.505.600	Rp 3.248.436.543.702	Rp 3.452.084.858.316	Rp 4.098.959.475.200	Rp 2.958.851.796.284
	Total Kabupaten	Rp 2.706.393.897.900	Rp 3.285.773.258.400	Rp 2.974.349.239.295	Rp 3.011.341.217.084	Rp 3.125.233.318.799	Rp 3.020.618.186.296

BIODATA

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Muhammad Reza Fahlefi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Rimba Raya, 4 Juli 1996
3. Jenis Kelamin :Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Lr Cendana No 12, Dusun Bahagia,
Syiah Kuala Banda Aceh.
7. Telephone/Hp : 0812-2393-2347
8. Email : rezascootr@yahoo.com
9. Warga Negara : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Dasar/MI :SD Negeri 54 Banda Aceh
2. Pendidikan SMP/MTs :MTsN 1 Banda Aceh
3. Pendidikan SMA/MA :SMA Negeri 8 Banda Aceh

C.Orang Tua

1. Nama Ayah :Tarmizi (Alm)
2. Pekerjaan Ayah : -
3. Nama Ibu :Mariami
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat orang Tua : Jalan Bireun-Takengon Km 62, Kp.
Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo,
Kab Bener Meriah.

D. Pengalaman Organisasi

1. DEMA FEBI UIN Ar-Raniry tahun 2015-2016, 2016-2017.